

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh R. Moh. Mukhtar. Jamil ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Agustus 2009

Pembimbing,



M. Romdlon, SH. MH
NIP. 150247447

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh R. Moh. Mukhtar Jamil ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

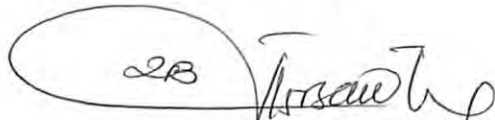
Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



M. Romdlon, SH., MH.
NIP. 196212291991031003

Sekretaris,



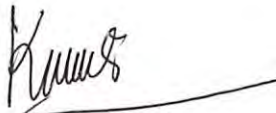
Saiful Bahar, S. Ag., M. Si.
NIP. 197803152003121004

Penguji I,



Sahid, MH., M. Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji II,



Sukanto, SH., MS.
NIP. 196003121999031001

Pembimbing,



M. Romdlon, SH., MH.
NIP. 196212291991031003

Surabaya, 27 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang kewarisan kakek bersama saudara yang mengkomparasikan antara perspektif imam Syafi'i dan Hazairin. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: pertama; bagaimana perspektif imam Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara?, kedua; bagaimana perspektif Hazairin tentang kewarisan kakek bersama saudara?, dan ketiga; bagaimana analisis terhadap komparasi kewarisan kakek bersama saudara dalam perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin?.

Data penelitian dihimpun melalui kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif dan komparatif. Dari beberapa argumen dan penjelasan-penjelasan atas data yang ada, penyusun menarik konklusi, kewarisan kakek bersama saudara merupakan suatu permasalahan kontroversial jika diperbandingkan antara pendapat imam Syafi'i dan Hazairin, karena dari kedua tokoh ini memiliki konsep tersendiri dalam merumuskan kelompok ahli waris.

Kakek dalam persepsi imam Syafi'i hanyalah kakek dari ayah saja yang mendapatkan waris, namun kekek dari ibu bukanlah sebagai ahli waris, dan kakek dapat sama-sama menjadi ahli waris jika bersamaan dengan saudara laki-laki maupun perempuan sekandung, seayah, sementara saudara laki-laki dan perempuan seibu terhalang dengan adanya kakek.

Sedangkan Hazairin memahami kakek, yaitu kakek dari ayah ataupun ibu sama-sama sebagai ahli waris, namun ia terhalang sebab adanya saudara laki-laki dan perempuan, baik ia sekandung, seayah, ataupun seibu beserta keturunan dari para saudara, sebab kekerabatannya lebih tinggi saudara beserta keturunannya dari pada kakek.

Kewarisan kakek bersama saudara tidak lepas dari penafsiran surat al-Nisā' ayat 12 dan 176 tentang mewarisnya saudara dalam keadaan *kalālah*. Dalam perspektif imam Syafi'i, *kalālah* diartikan orang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan ayah, sehingga kakek dan saudara sama-sama berhak mewaris jika tidak ada keturunan laki-laki dan ayah, yang pada penerapannya kakek lebih diuntungkan dalam pembagiannya. Sedangkan Hazairin, arti *kalālah* diartikan orang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan laki-laki maupun perempuan dan diperluas artinya dengan menghubungkan dengan surat al-Nisā' ayat 33 tentang ahli waris pengganti, sehingga kakek terhalang dengan adanya saudara dan mewarisnya kakek hanya ketika *kalālah*, yaitu sebagai pengganti dari ayah atau ibu.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, kewarisan kakek bersama saudara walaupun tidak tercantum dalam KHI, tapi dalam penyelesaiannya hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana isi Pasal 229 KHI, sehingga dapat diterapkan menurut imam Syafi'i, karena dalam KHI sendiri tidak dikenal adanya ahli waris pengganti sebagaimana pendapat Hazairin, dan apa yang tercantum dalam Pasal 185 KHI walaupun merupakan inovasi baru dalam hukum kewarisan Islam atas penggantian cucu sebagai pengganti dari ayahnya yang kebetulan meninggal terlebih dahulu, hanyalah didasarkan atas keadilan dan kemanusiaan dalam menjawab tuntutan perubahan sosial berkenaan dengan hukum kewarisan.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka dirasa perlu untuk diatur dalam KHI tentang kewarisan kakek bersama saudara, supaya dalam pelaksanaannya dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Kajian Pustaka	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	15
A. Dasar-Dasar Hukum Waris.....	15
a. Pengertian Kewarisan.....	15
b. Sumber Hukum Waris.....	16
c. Rukun dan Syarat Waris	18
d. Sebab-sebab Menerima Waris.....	19
e. Penghalang Menerima Waris	20
B. Bagian Waris Kakek.....	23

	C. Bagian Waris Saudara	27
	D. Bagian Waris Kakek Bersama Saudara Menurut Para Sahabat	41
BAB III	PERBANDINGAN KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI' DAN HAZAIRIN	46
	A. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Imam Syafi'i	46
	a. Biografi imam Syafi'i	46
	b. Konsep Hukum Waris menurut Imam Syafi'i	49
	c. Bagian Waris Kakek	60
	d. Bagian Waris Saudara	62
	e. Kewarisan Kakek Bersama Saudara	66
	B. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Hazairin	72
	a. Biografi Hazairin	72
	b. Konsep Hukum Waris Menurut Hazairin	75
	c. Bagian Waris Kakek	86
	d. Bagian Waris Saudara	87
	e. Kewarisan Kakek Bersama Saudara	94
BAB IV	ANALISIS KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA PERSPEKTIF IMAM SYAFI' DAN HAZAIRIN	103
	A. Analisis Terhadap Komparasi Kewarisan Kakek Bersama Saudara Terhadap perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin dari Latar Belakang Persamaan dan Perbedaannya	103
	B. Perspektif Hukum Waris Imam Syafi'i dan Hazairin dalam Konteks Hukum Waris di Indonesia	115
BAB V	PENUTUP	118
	A. Kesimpulan	118
	B. Saran-Saran	120
	DARTAR PUSTAKA	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan salah satu tatanan hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia agar pasca meninggalnya seseorang tidak terjadi perselisihan dalam sebuah komunitas keluarga disebabkan adanya perebutan harta warisan. Islam sebagai agama *rahmatan li al-'a>lami>n* sudah mengantisipasi sedemikian rupa melalui pengaturannya dalam al-Qur'a>n secara eksplisit dan implisit, terutama surat al-Nisa>' ayat 11, 12, 176 dan al-Hadis| yang memuat Sunnah Rasulullah saw. yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum fikih Islam melalui ijtihad orang yang memenuhi syarat sesuai dengan ketetapan Allah swt.

Salah satu yang diijthadkan adalah kasus kewarisan '*jad ma'a al-ikhwah*' (kakek bersama saudara), yaitu terjadi sejak masa sahabat Nabi. Masalah ini muncul dikarenakan tidak ada nash *s{ari>h* dan *qat}*'i yang menjelaskannya. Hak kewarisan saudara disebutkan secara langsung dalam al-Qur'a>n surat al-Nisa>' ayat 12 dan 176 sedang hak kewarisan kakek hanyalah berdasarkan penalaran, dalam hal ini perluasan arti *al-ab* (ayah), dan pilihan arti *kala>lah* dalam surat al-

Nisa>' ayat 12 dan 176 serta penafsiran hadis-hadis juga tidak memberikan gambaran yang jelas.¹

Di kalangan *fuqaha*’, banyak perbedaan interpretasi dalam al-Hadis dan al-Qur’an untuk menyelesaikan solusi kewarisan kakek ketika bersama saudara, di mana seseorang dapat berpegang pada pendapat yang *ra’ji*h (kuat) serta dapat dijadikan sandaran dari argumentasi mereka, seperti pendapat golongan Syi’ah, *’ahlu al-Sunnah* yaitu Maliki, Hanafi, Syafii, dan Hambali. Doktrin fiqih waris Syafi’i sendiri banyak dianut dan berkembang di Indonesia, hal ini terkait dengan kesejarahannya yang panjang sejak masuknya Islam di Indonesia sejak abad ke 7 masehi hingga sekarang.²

Pada tahun 1960-an Hazairin seorang intelektual muslim Indonesia menawarkan reinterpretasi baru terhadap hukum kewarisan Islam sehingga berperan pula pada perkembangan hukum kewarisan Islam.³

Namun dalam menanggapi masalah 'kewarisan kakek bersama saudara' ada perbedaan yang tajam antara ajaran Imam Syafi'i dan Hazairin. Sebab Imam Syafi'i membagi ahli waris itu ke dalam tiga kelompok, yaitu *z/awi al-furu>d}*, *'as}abah* dan *z/awi al-arha>m*. *Z/awi al-furu>d}* adalah orang yang menerima bagian pasti, sementara *'as}abah* adalah ahli waris yang memperoleh bagian sisa dan *z/awi al-arha>m* merupakan keturunan ahli waris yang mempunyai hubungan

¹ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 164.

² Idris Ramulyo, *Hukum Perwarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, h. 3.

³ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 3.

kerabat dengan pewaris namun tidak mewarisi dalam kedudukan *z/awi al-furu>d}* dan *'as/abah*. Selain itu dalam ajaran imam Syafi'i juga dikenal adanya hijab-menghijab, artinya seorang ahli waris dapat menyebabkan ahli waris lainnya terhalang menerima bagian waris.

Kewarisan kakek dalam persepsi Imam Syafi'i, ada kakek yang *s}ahi>h* (dari jalur ayah), dia bisa mendapatkan waris yang kedudukannya sebagai *z/awi al-furu>d}* juga '*as}abah* dan kakek *gairu s}ahi>h* (jalur ibu) tidak dapat menjadi ahli waris karena tergolong *z/awi al-arha>m*. Kakek tetap mendapat waris walaupun bersamaan dengan saudara laki-laki atau perempuan sekandung dan seayah, tetapi saudara perempuan atau laki-laki seibu terhibab dengan adanya kakek.

Sementara Hazairin, juga membagi *z/awi al-furu>d*}, *z/awi al-qara>bah* dan *mawa>li*. Istilah *z/awi al-furu>d*}, juga dipakai oleh Hazairin dengan mengartikan sama sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Beliau menolak konsep '*as/a>bah* sebagaimana diterapkan Imam Syafi'i dan Hazairin menyebut '*as/abab* dengan istilah *z/awi al-qara>bah* yaitu orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu. Selain hijab-menghijab, dikenal juga *mawa>li*, yaitu mereka yang mewarisi harta, sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka berdasarkan kelompok keutamaan masing-masing, sementara dalam kewarisan imam Syafi'i tidak dikenal adanya penggantian ahli waris.

Terhadap kewarisan kakek, Hazairin tidak membedakan antara kedudukan kakek melalui ayah dan kakek melalui ibu, mereka mempunyai kedudukan yang

Tampak kontras pemikiran Hazairin dengan Imam Syafi'i yang masing-masing berselisih, sebab punya konsep waris tersendiri dalam menangkap pesan Allah swt. dan Rasul-Nya, sedangkan latar belakang dan corak atau metode berpikir seseorang akan sangat mewarnai pola pemahamannya terhadap hukum waris.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan sistematis, obyek penulisan ini akan difokuskan pada masalah bagian waris kakek bersama saudara, maka studi penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Imam Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara?
2. Bagaimana perspektif Hazairin tentang kewarisan kakek bersama saudara?
3. Bagaimana analisis terhadap komparasi kewarisan kakek bersama saudara dalam perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini substansinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "Studi Komparatif Kewarisan Kakek Bersama Saudara dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin" namun ada beberapa judul penelitian yang dilakukan mahasiswa Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin:

1. Pemikiran Prof. Dr. Hazairin tentang Mawadli dan Implikasinya terhadap Hukum Waris Islam di Indonesia oleh Digno jurusan Ahwal al-Syakhsyah fakultas Syari'ah tahun 2000. Skripsi ini menjelaskan tentang pemahaman Hazairin tentang konsep mawadli dalam penafsirannya terhadap surat al-Nisa' ayat 33, yaitu adanya penggantian ahli waris. Demikian pula skripsi ini

mengaitkan terhadap konteks Hukum Waris Islam di Indonesia yang ternyata dalam KHI sebagai pegangan hakim-hakim di peradilan Agama tidak menerima adanya konsep ini.

2. Sistem Hukum Kewarisan Islam menurut Konsep Imam Syafi'i dan Hazairin serta Implikasinya terhadap Hukum Kewarisan di Indonesia, penelitian dari M. Zainal Abidin jurusan Ahwal al-Syakhsyah fakultas Syari'ah tahun 2003. Skripsi ini membandingkan pembagian ahli waris yang dikonsepkan imam Syafi'i dan Hazairin yang kemudian menghubungkan konteks hukum kewarisan di Indonesia yaitu KHI yang lebih cenderung pada pendapat imam Syafi'i.
3. Relevansi Pemikiran Hazairin tentang Ahli Waris Pengganti dengan KHI Pasal 185 oleh Mutimmatul Faidah jurusan Ahwal al-Syakhsyah fakultas Syari'ah tahun 2006. Skripsi ini merelevansikan pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti dengan KHI Pasal 185 yang menyimpulkan bahwa pasal tersebut beresensi ada pengganti ahli waris terhadap keturunan, namun tidak menurut pendapat Hazairin tetapi karena adanya unsur kemaslahatan.
4. Studi Komparatif tentang Waris 'Asabah menurut Hazairin dan Madzhab Empat oleh Syabbul Bachri jurusan Ahwal al-Syakhsyah fakultas Syari'ah tahun 2007. Skripsi ini membandingkan tentang istilah 'Asabah atau ahli waris yang mendapat sisa dalam perspektif Hazairin dan imam Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.

Dengan demikian skripsi ini murni penelitian yang dilakukan penulis dan belum ada yang membahas dari skripsi, maupun tesis yang ada sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan ini, maka tujuan dari pada penelitian ini di dasarkan pada kerangka rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui perspektif Imam Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara.
2. Untuk mengetahui perspektif Hazairin tentang kewarisan kakek bersama saudara.
3. Untuk menganalisis terhadap komparasi kewarisan kakek bersama saudara dalam perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin dari aspek latar belakang perbedaan dan persamaan, serta perspektif hukum waris Imam Syafi'i dan Hazairin dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil Penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat antara lain, yaitu:

1. Aspek Teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan yaitu untuk dijadikan bahan studi dalam rangka mengembangkan teori hukum kewarisan khususnya tentang kewarisan kakek bersama saudara.

2. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman bagi masyarakat, khususnya tokoh agama dan penegak hukum dalam rangka memperjelas dan menyempurnakan aturan tentang ketentuan kewarisan kakek bersama saudara dalam kajian hukum kewarisan Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul skripsi tentang 'Studi Komparatif Kewarisan Kakek Bersama Saudara dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin', maka perlu untuk dijelaskan konsep yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu:

Studi Komparatif adalah kajian atau penelitian ilmiah yang bersifat komparasi (perbandingan sebagai penjelasan); berdasarkan persamaan dan perbedaan; kelemahan dan kelebihan dari obyek yang diteliti.⁴

Perspektif adalah pandangan (sebagai) acuan; sudut pandang, prinsip ide.⁵ Dari beberapa makna tersebut digunakanlah tinjauan, untuk meneliti, meninjau pendapat atau pandangan Imam Syafi'i dan Hazairin tentang kewarisan kakek bersama saudara.

Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdallah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraisyi. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i yang berhaluan Sunni dan banyak

⁴ M. Dahlan Y Al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, h. 400.

⁵ *Ibid.*, h. 606.

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah:

- a. Data tentang kewarisan kakek bersama saudara dalam perspektif Imam Syafi'i.
- b. Data tentang kewarisan kakek bersama saudara dalam perspektif Hazairin.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama sebagai bahan rujukan hukum,⁹ yaitu:

- *Al-Umm* dan *al-Risalah* oleh imam Syafi'i
- *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan al-Hadis, dan Hendak Kemana Hukum Islam* oleh Hazairin

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua buku, dokumen, tulisan yang ada kaitannya dengan bahasan penelitian ini,¹⁰ diantaranya adalah:

- *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Ibnu Rusydi Al-Qurtubi,
- *Minhaj Umar bin al-Khatib fi Tasyri' Dira'sah Mustau'ibah Lifiqhi Umar wa Tanzimuhu*, Muhammad Baltaji,
- *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, oleh Wahbah Zuhaili,

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h.30.

¹⁰ *Ibid.*,

b. Metode komparatif, yaitu menghubungkan diantara latar belakang konsep ide-ide antara tokoh yang general dan mempunyai *singularitas* (bahasa) sebagai konsep dari subyek atau ekspresi tokoh tertentu yang bersifat komunikatif; yang satu mempengaruhi yang lain dari segi persamaan dan perbedaan dalam memahami kejelasan dan ketajaman suatu obyek penelitian.¹³ Dengan demikian, kajian ini membandingkan latar belakang pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin terhadap kewarisan kakek bersama saudara, sehingga mendapatkan suatu persamaan, perbedaan dan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan sebagai gambaran umum yang merupakan pola dasar seluruh skripsi ini, yaitu berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan secara umum tentang dasar-dasar hukum waris, kewarisan kakek, kewarisan saudara, kewarisan kakek ketika bersama saudara menurut para sahabat.

¹²Anton Bakker, Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, h. 54

¹³ *Ibid.*, h. 50-51.

Bab ketiga, menjelaskan tentang kewarisan kakek bersama saudara dalam dua sub bab, yaitu dalam konsep kewarisan menurut Imam Syafi'i dan konsep kewarisan menurut Hazairin. Masing-masing dari tokoh dicantumkan biografi, konsep hukum waris, bagian waris kakek, bagian waris saudara dan kewarisan kakek bersama saudara.

Bab keempat, adalah analisis kewarisan kakek bersama saudara perspektif Imam Syafi'i dan Hazairin. Pembahasan ini meliputi dua sub bab: pertama; analisis pemikiran Imam Syafi'i dan Hazairin terhadap kewarisan kakek bersama saudara dalam sudut pandang komparatif, yaitu perbedaan serta persamaannya, kedua; perspektif hukum waris Imam Syafi'i dan Hazairin dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia.

Bab kelima, adalah bab penutup yang menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan beserta saran-saran.

BAB II

A. Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian Hukum Waris

Ayat-ayat al-Qur'a>n dan al-Hadis| Nabi saw. menegaskan banyak hal dalam kewarisan. Uraian yang digunakan oleh al-Qur'a>n untuk menunjukkan adanya kewarisan terdapat tiga kata, yakni *al-irs*, *al-fara'id*, dan *al-tirkah*.¹

Fara>'id dalam istilah dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar-kecilnya oleh *Syara'*. Oleh sebagian *Farad* yang ditakrifkan dengan:

أَلْفَقَهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْأَرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ.

“Ilmu Fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.”²

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mendefinisikan:

الْعِلْمُ الْمَوْصَلُ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدَرِ مَا يَجِبُ بِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنَ التَّرَكَةِ

¹Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, h. 32.

² Muhammad al-Khatib asy-Syarbini>, *Mugn>i al-Muhta>j*, juz IV, h. 7.

“Ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris).”³

b. Sumber Hukum Waris

Dasar hukum Islam adalah berasal dari al-Qur'a>n, al-Sunnah, dan Ijtihad, demikian juga dalam hukum waris Islam. Penggunaan ketiga sumber hukum tersebut didasarkan pada ayat al-Qur'a>n dan al-Hadis| Nabi saw. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini adalah surat al-Nisa>' ayat 59 yang berartikan orang mukmin diharuskan untuk taat kepada Allah, Rasul, dan taat kepada 'uli al-'Amri.⁴ Uli al-'Amri yaitu orang yang dipercaya karena pengetahuan, kepandaian dalam mengatur sistem kehidupan masyarakat, mereka adalah para penguasa, tokoh dan 'ulama>'. Dalam *us}ul al-fiqh*, ketetapan hukum penguasa dapat menghapus perselisihan ulama', maka 'uli al-'amri boleh mengharuskan masyarakat untuk memakai pendapat yang disepakati oleh para mujtahid, sebab itu merupakan wewenangnya dalam mengikat suatu urusan yang merupakan hasil ijtihad. Namun itu pun dengan syarat, 'uli al-'amri tersebut harus termasuk jajaran para *mujtahid*. Adapun jika bukan, maka segala perintahnya tidak perlu dianggap, kecuali setelah melalui musyawarah dan persetujuan para ulama' syari'at.⁵

³ Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawaris/ fi> al-Syari'ati al-Islamiyah 'ala Maz/ hab al-A'immah al-Arba'ah*, h. 7.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 19.

⁵ Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, h. 87-89.

Dari Hafs} Ibnu 'Umar diceritakan, bahwa suatu ketika terjadi dialog antara Rasul dengan Mu'adz bin Jabal:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي، وَلَا آلُو

“Nabi Bertanya: apa yang kamu perbuat jika dihadapanmu ada perkara yang harus diselesaikan?”. Jawab mu’adz: “saya akan memutuskan atas dasar kitab Allah (al-Qur’an)”. Nabi bertanya lagi:” jika dalam kitab Allah tidak kamu jumpai?”. Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah”. Nabi bertanya lagi:” jika tidak kamu jumpai dalam sunnah Rasul?”. Jawab Mu’adz:” saya akan berijtihad dengan menggunakan akalku, dan aku tidak akan membiarkan perkara tanpa putusan”. (HR. Abu Dawud.)⁶

Dari ayat dan hadis| tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber dari ajaran Islam hanya ada tiga, adapun operasionalnya dapat melihat kepada situasi dan kondisi yang berkembang. Ketiga sumber ajaran Islam tersebut membentuk hubungan sirkular dan saling berdialog untuk kemudian menemukan makna dan pengertian yang terkandung dalam ayat al-Qur’a>n, al-Hadis|, dan Ijtihad.

Diantara masalah yang diijtihadkan para ulama adalah 'kewarisan kakek bersama saudara', dimana banyak perbedaan dikalangan sahabat dalam dalam mengistimbatkannya.

⁶ Abi> Da>wud Sulaiman ibn Al-Sajasta>ni>, *Sunan Abi> Da>wud*, juz II, h. 510.

1. Kematian orang yang mewariskan (pewaris), baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang.
2. Ahli waris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya anak dalam kandungan yang secara hukum dianggap hidup, karena mungkin rohnya belum ditiup.
3. Bila tidak ada penghalang dalam mendapatkan waris.⁸

d. Sebab-Sebab Menerima Waris

Sebab menerima warisan selama tidak ada penghalang, adapun sebab-sebabnya adalah:

1. Hubungan kekerabatan (Nasab)

Yaitu hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan *muwarris*.| Hubungan kekerabatan ini dapat terjadi dalam garis keturunan ke bawah/*furu'* (anak), ke atas/*us\ul* (bapak-ibu), maupun menyamping/*hawasyi* (saudara).

2. Ikatan perkawinan

Adalah sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah yang diikat dengan ijab kabul atau nikah yang sah. Terjadinya saling mewarisi tentu masih berstatus suami-istri walaupun istri dalam keadaan *talak raj'i* yang masih masa iddah dan antara suami atau istri meninggal lebih dahulu.

3. *Wala'*

⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Jilid XIV , h. 259-260.

²¹ Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, jilid III, h. 541.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَذْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَذْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ السُّدُسَ آخَرَ طُعْمَةٌ

"Dari Imran ibn Husain telah datang kepada Rasulullah saw. Dan berkata: sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki saya sudah meninggal, lalu berapakah bagian saya dari harta warisannya. Nabi menjawab: kamu mendapat seperenam. Setelah orang itu pergi, beliau memanggilnya kembali dan bersabda: untuk kamu seperenam lagi. Setelah orang itu pergi, beliau memanggilnya kembali dan bersabda: Sesungguhnya seperenam yang kedua itu adalah tambahan".²²

Menurut Abu> 'Isa> hadis| ini hadis hasan s}ahi>h.²³ Al-S{an'a>ni menjelaskan bagian 1/6 tersebut sebagaimana mestinya perolehan kakek, sedangkan sisa itu adalah sebagai 'as}abah-nya.²⁴

عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَيُّكُمْ يَعْلَمُ مَا وَرَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّ؟ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَا، وَرَّثَهُ رَسُولُ اللَّهِ السُّدُسَ، قَالَ مَعَ مَنْ؟ قَالَ لَأَدْرِي، قَالَ: لَأَدْرَيْتَ فَمَا تُعْنِي إِذَا.

"Dari Hasan, 'Umar menanyakan tentang bagian untuk kakek. Maka Ma'qil bin Yasa>r menjawab bahwa Rasulullah saw menentukan bagiannya 1/6. Berkata Umar "Dengan siapa kakek itu berbagi?" Ma'qil menjawab "entahlah", berkata Umar "tidak taukah engkau!, jika begitu engkau tidak menambah pengertian bagiku!".²⁵

Namun yang dianggap kakek dalam mendapatkan waris dari maksud hadis| tersebut sebagaimana jumhur sahabat adalah kakek s}ahi>h atau dari ayah saja

²² Muhammad bin'I>sa> bin Saurah, *al-Ja>mi'u al-S}ahi>h Sunan al-Turmuz/i*, h. 365.

²³ *Ibid.*,.

²⁴ Al-San'a>ni, *Subu>l al-Sala>m*, alih bahasa Abu Bakar, juz III, h. 360. }

²⁵ Abi> Da>ud Sulaiman bin al-'Asy'as\ al-Sajastani>, *Sunan Abi> Da>ud*, Juz II, h. 13.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الْثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan" (al-Nisa>': 176).³⁰

Kiya> al-Harra>si seorang mufassir menyatakan adanya pertanyaan umar yang memberi petunjuk bahwa arti *kala>lah* dalam ayat itu bukanlah arti lugowinya (*anna ma'na al-kala>lah syar'an gair mafhu>m min al-ism lugatan*). Alasannya umar pasti mengetahui arti lugowinya, karena ia seorang ahli bahasa. Di pihak lain, ketidaksediaan Rasul menjawab pertanyaan tersebut secara jelas, memberi petunjuk bahwa istilah-istilah al-Qur'a>n (*ma'a>ni> al-Qur'a>n*) boleh diistimbatkan.³¹

Di bawah pimpinan Abu Bakr, pertama-tama menetapkan bahwa saudara hanya berhak mewarisi kalau seseorang meninggal dalam keadaan *kala>lah*, dan surat al-Nisa>' ayat 12 mengatur hak *kala>lah* saudara seibu, sedang pada ayat

³⁰ *Ibid.*, h.139-140.

³¹ Al-Kiya al-Harra>si>, *Ahka>m al-Qur'a>n*, Jilid I, h. 93

Agaknya sudah dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa lafaz *walad* secara hakiki mencakup anak langsung (baik laki-laki maupun perempuan), yang ruang lingkupnya keturunan ke bawah anak hanyalah secara majazi. Begitu pula adanya pembedaan keturunan yang hanya melihat dari sisi garis laki-laki. Mungkin penentuan arti lafaz *walad* tersebut adalah *al-Isti'mal*. Dengan demikian, sulit dihindari bahwa adat masyarakat Arab masa itu menjadi dasar penentuan keturunan hanya melalui garis laki-laki yang dianggap *al-walad*. Selanjutnya kata *akhun* dan *ukhtun* baik itu yang terdapat dalam ayat 12 maupun 176, at-T{abari mengartikan kedua lafaz} tersebut pada ayat 12 adalah untuk saudara seibu. Penafsiran tersebut agaknya didasarkan pada *qira'at syazzah* yaitu:

Artinya: "Bila seseorang meninggal dalam keadaan kalalah, baginya ada saudara laki-laki dan saudara perempuan (seibu)."

Pada bagian ini akan dicoba untuk menganalisa hadis|-hadis| yang dianggap pokok tentang kewarisan yang berhubungan dengan *kalalah*, seperti:

⁴⁴ Al-Kiya al-Harrasi., jilid I, h. 353

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ أَعْطِي ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِي أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

*“Dari Jabir bin Abdullah berkata: janda Sa’d datang kepada Rasulullah Saw, bersama dua orang anak perempuan Sa’d dan berkata: ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’d yang telah gugur secara Syahid bersamamu di perang uhud. Paman mereka telah mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak menyisakan bagi mereka harta peninggalan dan mereka tidak dapat menikah kecuali apabila mereka mempunyai harta. Nabi saw berkata: Allah akan memberi keputusan. Lalu turun ayat kewarisan. Nabi saw memanggil si paman dan berkata berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa’d, seperdelapan untuk isteri Sa’ad dan selebihnya tambahan untukmu”*⁴⁵

Dalam beberapa riwayat hadis| ini diriwayatkan oleh Abu> Dawud, al-Turmuzi, dan Ibn Majah. Al-Turmuzi menilai hadis ini dengan *“Hasan S}ahih”*. Namun demikian, hadis tersebut sangat dikenal sebagai dalil bahwa ayat 12 mengatur tentang hak saudara laki-laki sebagai *‘as}abah* , ketika bersama dengan anak perempuan. Jumhur ulama pun menyatakan bahwa ayat 12 ini adalah *mubyyin* (penjelas) arti *kala>lah* dalam surat al-Nisa>’ ayat 176. Maka arti *kala>lah* pada hadis ini dibatasi hanya pada ketiadaan anak laki-laki. Pemahaman seperti ini dikuatkan oleh hadis| penulisan matannya menurut Bukhari dan Muslim,

⁴⁵ Imam al-Khafis Abi Daud Sulaiman bin al-A’sy’as al-Sajastany, *Sunan Abu Daud*, Juz II, h. 329

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَقُّوْا مِنَ الْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

"Menceritakan mu>sa bin isma>'il, menceritakan wuhaib, menceritakan Ibnu t}awus dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas semoga meridai Allah swt pada keduanya, dari Nabi saw berkata: bagikanlah warisan-warisan itu kepada orang yang berhak, adapun sisanya adalah ahli waris lelaki yang paling dekat"⁴⁶

Hadis di atas dirawikan oleh Bukhari, Muslim, at-Turmuzi, Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Nasa'i. Menurut al-Asqalani, hadis ini *mursal* (terputus) hanya sampai pada T{awus, akan tetapi al-Nasa'i menguatkan hadis| mursal ini dengan

kaidah: إِذَا تَعَارَضَ الْوُصْلُ وَلَا رِسَالٌ وَلَمْ يَرْجَعْ أَخَذَ الطَّرِيقَيْنِ ۖ قَدَّمَ لِلْأَصْلِ

Secara matan hadis ini lebih kuat dari pada hadis-hadis sebelumnya dengan mendasarkan pada hadis ini adalah ucapan Rasul. Jumhur Ulama menafsirkan kata *aula Rajulin Z/akar* dengan kerabat laki-laki yang paling dekat dari pewaris. Artinya kata *aula* diterjemahkan dengan arti *aqra>b* dan bukan dengan kata *al-had* (lebih berhak) Maka kata *aula Rajulin Zakarin* berarti anak laki-laki (atau keheranan laki-laki kebawahnya), ayah, kakek. Dengan demikian, sekiranya

⁴⁶ Ahmad bin 'Ali bin H{ajar al-'Asqala>ni, *Fath{ al-Ba>ri> bi Syarh{i muhammad bin Isma'i>l bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizabah al-Bukhari*, Juz XII, h. 11

ada sisa warisan setelah pembagian kepada *z/awi al-furud*}, maka sisanya diberikan kepada ‘*as/abah*.⁴⁷

Sementara itu Ibn Abbas, memahaminya secara ‘*am*, dengan alasan bahwa laki-laki akan menghabiskan harta sendirian dan tidak akan melibatkan perempuan yang sederajat dengannya menjadi ‘*asabah*. Sedang jumhur ulama memahami hadis ini sebagai *khas* dengan dalih hanya berlaku terhadap orang-orang yang tidak disebutkan dalam al-Qur’a>n, yaitu kerabat selain dari anak (keturunan) laki-laki, ayah dan saudara laki-laki.⁴⁸

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَرْحِبِيلَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأَخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ وَأَنْتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئَابَعُنَا فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلابْنَةِ النَّصْفُ وَلِلابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ

Dari Huzail ibn Surahbil berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Abu Musa al-Asy'ary dan salman bin Rabi'ah al-Bahily dan bertanya kepada mereka berdua tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah dan ibu. Kemudian mereka berdua berkata: untuk anak perempuan setengah dan selebihnya untuk saudara perempuan. Datanglah kemudian ia kepada ibn Mas'ud. Kemudian seorang laki-laki tersebut datang kepada ibn mas'ud dan bertanya kepadanya serta memberitahukan apa yang mereka berdua katakan. Kemudian ia menjawab (Abdullah ibn Mas'ud), jikalau begitu tentu aku kaliru dan tidaklah aku

⁴⁷ Al-Nawawi, *S/ahi>h Muslim bisyarh al-Nawawi*, Jilid II, h. 53

⁴⁸ Al-Asqalani, *Fath{ al-Ba>ri> bi Syarh{i muhammad bin Isma'i>l bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizabah al-Bukhari*, Jilid XII, h. 12.

⁵¹ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alami*, h. 267.

ayat-ayat yang bersifat *am*. Namun demikian, hadis tersebut mengungkap bahwa istilah '*as/abab*' dalam pandangan Rasul tidak berkenaan dengan kewarisan.

Hadis anak perempuan Sa'ad yang dari segi sanad tidak mencapai peringkat *s/ahi>h*, karena itu tidak perlu dihadapkan secara langsung dengan al-Quran. Kasus yang terjadi pada Abu Musa sebagaimana ditunjuk pada hadis ketiga dianggap oleh Ibn Abbas bertentangan dengan ayat 176. Dengan demikian sejalan dengan kecenderungan untuk *mentawaqufkan* hadis tersebut sampai ditemukan bukti atau cara pandang yang lain.

عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَمَامَةُ سُورَةِ التَّوْبَةِ وَأَنَّ آخِرَ آيَةِ الْكَلَالَةِ

“Dari al-Barra”, surat terakhir yang turun secara lengkap adalah surat at-Taubah dan ayat yang terakhir yang turun adalah ayat tentang kalalah” ⁵²

Dalam periwayatan lain dikatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah akhir surat al-Nisa>',⁵³ Hadis| di atas diriwayatkan oleh Muslim, al-Bukhari, dan Abu Dawud. Al-Turmuzi menilai hadis ini sebagai *hasan s/ahi>h*. Mengenai hadis di atas, para ulama berbeda penafsiran sebagaian menafsirkan dalam bidang kewarisan, sebagian lagi menyatakan bahwa hadis ini tentang turunnya ayat terakhir secara lengkap.⁵⁴ Berdasarkan fenomena tersebut dapat dikatakan bahwa ayat 176 termasuk dalam kategori ayat yang turun pada masa akhir masa

⁵² Al-Nawawi, *Sahih Muslim bisyarh Al-Nawawi*, Jilid II, h. 59

⁵³ Al-Asqalani, *Fath al-Ba'ri*, jilid VIII , h. 267 : 4605, jilid XII , h.. 26:6744

⁵⁴ Al-Fuqayim, *Amal al-Baqi*, jilid VII, h. 287-4005, jilid XII, h. 283/744
 Al-Yassa Abu Bakar., *Ahli Waris Sepertialan Darah, Kajian Perbandingan Terhadap
 Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 116

karasulan Muhammad. Ini dapat berfungsi untuk melihat hadis|-hadis| kewarisan sebelumnya.

Dengan demikian *kalah* adalah suatu persoalan yang telah banyak meyita perhatian semenjak dari masa sahabat. Jumhur ulama mengartikannya dengan menunjuk orang yang tidak mempunyai anak laki-laki dan ayah. Arti ini diambil dari penggunaan masyarakat (*isti'mal*) serta penggunaan hadis sebagai takhsisnya (lihat penjelasan hadis ke tiga). Maka berdasar pada pemahaman tersebut anak perempuan atau ibu tidak dapat menghibah saudara dari keberhakan atas warisan.⁵⁵

Perbedaan cara pandang tersebut, berakar pada pemahaman kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat tersebut (ayat 12 dan ayat 176) yang apabila ditinjau dari sisi ushul, maka kata *kala>lah* termasuk kedalam kategori *mujmal* (lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkandung didalamnya). Abu Bakar r.a dan sahabat pada umumnya hanya menggunakan ayat 12 dengan langsung mencari hadis-hadis tadi sebagai penafsirnya. Sehingga kata *kala>lah* sesuai dengan arti *isti'mal* yaitu hanya mencakup pada ketiadaan anak laki-laki dan ayah.

Begitu juga terhadap kata *walad*, kata ini dalam al-Quran ayat 12 dan 176 dapat terkategori kepada lafaz *ẓāhir* (suatu lafaz yang meskipun tanpa pemahaman yang mendalam, telah dapat diketahui maksud yang dikandungnya melalui pembicaraan lafaz tersebut). Jumhur ulama menafsirkan kata ini secara

⁵⁵ At-Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'a>n*, jilid IV, h. 212-213

maka bagiannya $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan yang jelas, yaitu dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan.

3. Ketentuan bagi saudara seibu adalah $\frac{1}{6}$ bila mereka sendiri, baik itu laki-laki atau perempuan, dan $\frac{1}{3}$ bila mereka lebih dari seorang baik itu laki-laki atau perempuan dengan ketentuan yang pasti (2:1) antara laki-laki dan perempuan.

Setidaknya pemahaman tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap hadis ke 2 artinya ahli waris yang dapat menghibah saudara adalah ahli waris dari sisi keturunan anak dan ayah yang dalam kondisi tertentu saudara bisa berkedudukan sebagai *'asjabah*. Dengan demikian persoalan *kalah* pada dasarnya adalah mendudukan saudara sebagai ahli waris dan yang dapat menghibahnya adalah ahli waris dari sisi keturunan anak dan ayah.

D. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Para Sahabat

Para ulama sepakat bahwa ayah menghalangi kakek, dan kakek menggantikan ayah dengan menerima bagian tertentu saja dalam keadaan si mati meninggalkan keturunan laki-laki, dan hanya menerima '*asabah* saja jika si mati tidak meninggalkan keturunan yang menjadi ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dan menerima bagian tertentu dan '*asabah* dalam hal si mati meninggalkan keturunan perempuan yang menjadi ahli waris. Mereka sepakat pula bahwa ayah dan kakek menghalangi saudara seibu, dan ayah menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah, sementara saudara seibu akan mendapat waris hanya ketika *kala>lah*. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah kakek

dalam dalam hal menggantikan ayah, dapat menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah? ataukah dalam hal ini tidak dapat menggantikan ayah sehingga tidak dapat menghalangi mereka?.⁵⁸ Berikut dua golongan sahabat yang berselisih:

Pertama: Abu Bakar al-S{iddiq, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abii bin Ka'ab, Huz|aifah bin al-Yaman, Abi Sa'id al-Khudri, Mu'ad bin Jabal, Abi Musa al-Asy'ary, 'Aisyah, Abu Tsaur, Al-Muzanni, Mereka menyatakan, *Banu al-A'ayan* (saudara laki-laki dan perempuan kandung/ seayah dan seibu), *Banu> al-'Allat* (saudara laki-laki dan perempuan seayah), *Banu> al-Akhyaf* (saudara laki-laki dan perempuan seibu), terhalangi (gugur) hak warisnya dengan adanya kakek.⁵⁹ Mereka beralasan bahwa kakek akan mengganti kedudukan ayah bila telah tiada, dan memandang kakek sebagai ayah secara mutlak. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt:

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

"Dan Aku pengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub....."
(Yusuf : 38)⁶⁰

Juga hadis Nabi SAW: "*hubungkanlah fara'id kepada ahlinya. Maka sisanya untuk 'ashabah laki-laki yang lebih utama*". Kakek lebih utama dari pada saudara, sebagaimana kaidah dalam '*asabah* mendahulukan arah ayah dari pada arah saudara. Atas dasar ini mereka berkesimpulan bahwa jika ada datuk, maka

⁵⁸ Hasan Ahmad al-Khatib, *al-Fiqh al-Muqaranah*, 294-295.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa 'Adillatuhu*, Juz X h. 7759.

⁶⁰ Departemen Agama RI (DEPAG) , *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 323.

BAB III

PERBANDINGAN KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI' I DAN HAZAIRIN

A. Kewarisan Kakek Bersama Saudara Menurut Imam Syafi'i

Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i dan salah satu Imam mu'tabar dari Imam empat yang beraliran Sunni. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i al-Hasyim al-Mut}allabi al-Quraishi dan terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H/767 M di kota Ghazza.¹ Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah Saw pada Abdul Manaf.² Imam Syafi'i wafat di Mesir dengan menutup usia 54 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 204 H.³

¹ *Ensiklopedi Islam*, h. 455

³ *Ensiklopedi Islam*, h. 455.

dengan Faqih mazhab Hanafiyah Muhammad bin Hasan as-Syaibani dan belajar darinya. Imam Syafi'i mengumpulkan dua Ilmu Fikih yaitu; Fikih 'Irak dari Muhammad bin Hasan as-Syaibani dan Fikih Hijaz dari Imam Malik bin Anas.⁴

Imam Syafi'i adalah tokoh ahli pikir Islam yang besar di bidang hukum fikih. Adapun yang menjadi sumber dalil dan sistematikanya adalah al-Qur'a>n, al-Sunnah, al-Ijma', dan al-Qiyas.⁵ Metode pemikirannya mengkomparasikan aliran naqli dengan aliran ra'yi (akal), selain al-Qur'a>n, beliau menekankan penggunaan hadis yang benar-benar sah sanad perawinya dan memperkecil pendapat pribadi secara bebas. Imam Syafi'i menggunakan ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga dengan mendefinisikan sebagai kesepakatan antara para ahli hukum di suatu daerah atau kota, tetapi memperluas pengertiannya sebagai kesepakatan seluruh ahli dalam bidang itu dan al-Gazali salah satu muridnya membatasi dalam masalah cabang diserahkan pada kesepakatan para ahli saja. Al-Qiyas digunakannya dengan mencari persamaannya atas dasar al-Qur'a>n dan al-Sunnah. Beliau juga meneliti metode dan prinsip fikih melalui ilmu ushul fikih. Diantara karangannya adalah *al-Risalah*, *al-Umm*, dan *al-Mabsut*.⁶

Klasifikasi dalam Mazhab Syafi'i:

⁴ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i* , h. 17-21.

⁵ Romli, *Muqaranah Mazahib Fi al-Ushul*, h. 50.

⁶ *Ensiklopedi Islam*, h. 456.

Al-Arha>m adalah bentuk jamak dari kata *rah}mun*, dalam bahasa Arab berarti 'tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu'. Kemudian dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafaz{ rahim tersebut umum digunakan dengan makna 'kerabat', baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam.²²

Al-Arha>m memiliki arti luas yang diambil dari lafad '*arha>m* dalam surat al-Anfal: 75 dan al-Ahza>b: 6.²³ Secara umum *z/u al-Arham* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik mereka golongan '*as}ha>b al-furud*}, '*as}abah*, maupun golongan yang lain. Tetapi ulama *sunni* termasuk imam Syafi'i mengkhususkan kepada para ahli waris selain '*as}ha>b al-Furud*} dan '*as}abah* baik laki-laki maupun perempuan dan baik seorang maupun berbilang, selain suami dan istri.²⁴

Dalam menyelesaikan pembagian warisan kepada *z/u al-Arham*, para imam mujtahid berbeda pendapat, sama halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat. Dalam hal ini ada dua golongan, sementara Zaid bin Tsabit r.a., Ibnu Abbas r.a., imam Malik, dan imam

²² M. Ali al-S}abuni, *Al-Mawaris/ fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala> D}au' al-Kitab wa al-Sunnah*, h. 144.

²³ Husain bin 'ali> al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-a>s/a>r 'an Ima>m Muhammad bin Idris al-Syafi'i*, Jilid V, h. 78-79. Al-Syafi'i, *Ah{ka>m al-Qur'a>n*, 108.

²⁴ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 351.

1. Keturunan dari si mayyit selain dari *z//u al-fara>'id* dan *'as}abah*, yaitu: anak-anak dari anak perempuan dan keturunan mereka, anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki,
2. Leluhur atau asal turunan si mayyit selain dari *z//u al-fara>'id* dan *'as}abah*, yaitu: kakek yang tidak *s}ah{i>h{* (bapak dari ibu atau dari ibunya ibu) dan nenek yang tidak *s}ah{i>h* (ibu dari dari ayahnya ibu).
3. Keturunan dari ibu dan ayah selain dari *z//u al-fara>'id* dan *'as}abah*, yaitu: anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kandung dan keturunan mereka, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seayah dan keturunan mereka, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seibu dan keturunan mereka.
4. Keturunan dari datuk dan nenek selain dari *'as}abah*, yaitu: bibi kandung di garis bapak termasuk keturunannya, bibi sedarah di garis ayah, paman dan bibi seibu di garis ayah dan keturunannya, anak-anak perempuan dari paman kandung di garis bapak, anak-anak perempuan dari paman sehubungan darah di garis ayah dan keturunan mereka, anak-anak dari paman seibu di garis bapak dan keturunan mereka.²⁷

Dalam mazhab Syafi'i dikenal juga *al-Hujub* (penghalang waris) yang *Hujub H{irman*, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang, yaitu ada sederetan ahli waris yang tidak mungkin terkena hujub

²⁷ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia*, h, 125-127\.

hirman. Mereka terdiri dan enam orang yang akan tetap mendapatkan hak waris, yaitu: anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Bila orang yang mati meninggalkan salah satu atau bahkan keenamnya, maka semuanya harus mendapatkan warisan. Sederetan ahli waris yang dapat terkena hijab hirman ada enam belas, sebelas terdiri dari laki-laki dan lima dari wanita. Adapun ahli waris dari laki-laki sebagai berikut:

1. Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris.
2. Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
3. Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi *'asfabah ma'al gair*, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
4. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
5. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lebih dekat).

pasti kakek dalam al-Sunnah dan tidak ada satupun pendapat yang ditetapkan ahli hadis atas semua ketetapan bagian kakek.³⁴

Pada bagian kakek, imam Syafi'i memperinci, yaitu:

1. Kakek *s}ahi>h* (bapak dari ayah) menduduki status ayah apabila tidak ada ayah atau saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau seayah,
2. Mendapat 1/6 apabila ada *far'u wa>ris/ muz}akkar*, yaitu anak turun laki-laki,
3. Mendapat 1/6 ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *fa'u wa>ris/ mu'annas*, yaitu anak turun perempuan,
4. Menjadi '*as}abah* apabila tidak meninggalkan *far'u waris/ muz}akkar* atau *mu'annas*, yaitu anak turun laki-laki dan perempuan,
5. Kakek dapat menghibab: saudara seibu; anak laki-laki saudara kandung dan seayah; paman *s}ahi>h* (kandung) dan seayah, seterusnya anak turun mereka; bapaknya kakek *s}ahi>h* dan seterusnya ke atas, dan ia terhibab oleh ayah dan kakek *s}ahi>h* yang terdekat.³⁵

4. Bagian Waris Saudara

Saudara dalam surat al-Nisa>' ayat 12 dan 176 diperjelas oleh salah satu ulama>' Syafi'iyah, diantaranya Musa> bin 'Imra>n al-'Imra>ni>, yaitu *al-akh*

³⁴ Husain bin ‘Ali> al-Baihaqi, *Ma’rifah al-Sunan wa al-a>s/a>r ‘an Ima>m Muhammad bin Idris al-Syafi’i*, h. 65 j 67.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 99.

- c. Besama dengan a dan b sebelumnya tanpa saudara laki-laki $s\{ah\}i>h$, jika ada ia akan digandeng oleh saudaranya itu.
4. Dapat menghijab ketika ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki terhadap:
5. Saudara laki-laki dan perempuan seayah,
 - a. Anak laki-laki saudara $s\{ah\}i>h\}$ dan seayah,
 - b. Paman $s\{ah\}i>h\}$ dan seayah beserta sekalian anak turun mereka,
6. Tidak dapat menghijab saudara perempuan seayah kecuali ia terdiri dari dua orang tua lebih,
7. Ia terhijab oleh: ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki.³⁹

Pada bagian saudara perempuan seayah, imam Syafi'i membagi:

1. Mendapat $\frac{1}{2}$ apabila sendirian, tanpa bersama saudara perempuan *s/ahi>hah* atau saudara laki-laki seayah,
2. Mendapat $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tanpa adanya saudara perempuan *s/ahi>hah* atau saudara laki-laki seayah.
3. 'As}abah jika ia sendiri atau berbilang, dengan digandeng oleh saudaranya yang laki-laki seayah dalam klasifikasi 'as}abah bi al-gairi dengan berbanding 2:1,

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 114.

4. 'As}abah ma'a al-gairi apabila ia bersama: anak perempuan dan cucu perempuan garis laki-laki, anak perempuan, cucu-perempuan garis laki-laki dan seterusnya,
5. Mendapat 1/6 jika ia bersama saudara perempuan s}ah{i>h{ah} ,
6. Ia dapat menghijab pada: anak-anak dari saudara s}ahi>h dan seayah, para paman s}ah{i>h{ (kandung/seayah dan seibu) maupun seayah dan seterusnya anak-anak mereka,
7. Ia dapat terhijab oleh: anak laki-laki maupun cucu laki-laki garis laki-laki, ayah, saudara laki-laki s}ah{i>h{, saudara perempuan s}ah{i>h{ah yang menjadikannya 'as}abah ma'a al-gairi, dua orang saudara perempuan s}ahi>hah kecuali bersamanya saudara laki-laki seayah.⁴⁰

Pada bagian saudara perempuan seibu imam Syafi'i membagi:

1. Mendapat $\frac{1}{6}$ bila ia sendirian (termasuk apabila ia laki-laki) tanpa meninggalkan *far'un wa>ris/ muz/akkar* atau *mu'annas/* ataupun leluhur pewaris (ayah, kakek, dan seterusnya),
2. Mendapat $\frac{1}{3}$ bila ia dua orang atau lebih (termasuk yang laki-laki) tanpa meninggalkan *far'un wa>ris/ muz/akkar* atau *mu'annas/* maupun leluhur pewaris,
3. Ia terhibab oleh: anak laki-laki pewaris baik laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki dan perempuan garis laki-laki, ayah, kakek *s{ahi>h*.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, h. 118.

⁴¹ *Ibid.*, h. 121.

*bersama-sama dengan saudara mayyit, maka mereka tidak mendapatkan warisan. Warisan hanya didapatkan oleh kakek (ayah)."*⁴⁶

Juga pendapat beliau ketika para sahabat berselisih, dalam *al-Umm*: :

"Menurut hemat kami, ketika para sahabat Nabi berselisih pendapat, maka kita tidak mengacu pada satu pendapat, kecuali di kuatkan dengan hujjah dan dalil yang kuat serta sesuai dengan as-sunnah, begitulah hemat kami. Kami mendukung pendapat Zaid bin Slabit dan orang-orang yang sependapat dengannya, kerana pendapatnya dikuatkan dengan hujjah. Sementara menurut hemat pendapat kami, orang yang mengatakan bahwa kakek sama dengan ayah berdasarkan hujah sebagai berikut: yaitu firman allah swt. مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ أَبِيكُمْ

*Karena itu kakek diposisikan sebagai ayah dalam ikatan nasab. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa bagian kakek tidak kurang dari 1/6. begitulah ketentuan mereka bagi kekek. Kaum muslimin sepakat bahwa saudara seibu tidak mendapatkan harta warisan jika ada kakek. Begitu juga ketentuan mereka bagi ayah."*⁴⁷

Perincian kakek mewarisi bersamaan dengan saudara menurut Zaid bin Slabit diikuti oleh Imam Syafi'i, yaitu mempunyai dua keadaan yang masing-masing memiliki hukum tersendiri:

1. Kakek mewarisi hanya bersamaan dengan para saudara, tidak ada ahli waris lain dari 'as}ha>b al-furu>d, seperti istri atau ibu, atau anak perempuan, dan sebagainya. Kakek dipilhkan yang afd{al baginya agar lebih banyak memperoleh harta warisan dari dua pilihan yang ada. Pertama dengan cara pembagian (muqa>samah) dan kedua dengan cara mendapatkan sepertiga (1/3) harta warisan.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz III, h. 85.

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami> wa Adillatuhu*, Juz X, h. 7765.

Makna pembagian itu adalah kakek dikategorikan seperti saudara kandung, ia mendapatkan bagian yang sama dengan bagian saudara kandung laki-laki. Apabila kakek berhadapan dengan saudara perempuan kandung, maka ia menempati posisi yang sama seperti saudara kandung laki-laki. Berarti kakek mendapatkan bagian dua kali lipat bagian para saudara perempuan sekandung. Bila cara pembagian tersebut kemungkinan merugikan kakek, maka diberikan dengan memilih cara mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta waris yang ada.

2. Kakek mewarisi bersama para saudara dan *as}ha>b al-furud*{ yang lain, seperti suami-istri, ibu, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki atau selain dari para saudara. Kakek dapat memilih salah satu dari tiga pilihan yang paling menguntungkannya, yaitu dengan pembagian (*muqa>samah*), menerima sepertiga ($1/3$) sisa, atau menerima seperenam ($1/6$) dari seluruh harta waris yang ditinggalkan pewaris.⁴⁹

Hal ini pun dengan syarat bagiannya tidak kurang dari seperenam ($\frac{1}{6}$) bagaimanapun keadaannya. Kalau jumlah harta waris setelah dibagikan kepada $\{as\}$ tidak tersisa kecuali seperenam atau bahkan kurang, maka tetaplah kakek diberi bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) secara *fard*, dan para saudara kandung digugurkan atau dikurangi haknya. Adapun bila cara pembagian setelah para $\{as\}$ mengambil bagiannya bagian sang kakek lebih menguntungkannya, maka hendaknya dibagi

⁴⁹ *Ibid.*,.

dengan cara itu. Jika sepertiga ($1/3$) sisa harta waris yang ada malah lebih menguntungkan, maka itulah bagian kakek. Yang pasti, bagian kakek tidaklah boleh kurang dari seperenam ($1/6$) bagaimanapun keadaannya sebab bagian tersebut adalah bagiannya yang telah ditentukan syari'at.

Demikian juga ijhtihad Zaid bin S|abit masalah *al-Akdariyah* juga diikuti oleh Imam Syafi'i. Kasusny seperti berikut: bila seseorang wafat dan meninggalkan seorang suami, ibu, kakek, dan seorang saudara kandung perempuan. Apabila berpegang pada kaidah yang telah disepakati seluruh fuqaha termasuk Zaid bin S|abit sendiri maka pembagiannya adalah dengan menggugurkan hak saudara kandung perempuan. Akan tetapi Zaid bin Tsabit r.a. memberi saudara kandung setengah (1/2) bagian, dan menaikkan masalahnya dari enam (6) menjadi sembilan (9). Kemudian ia menyatukan hak saudara kandung perempuan dengan saham kakek, dan membaginya menjadi bagian laki-laki dua kali lipat bagian wanita. Setelah ditashih, masalahnya menjadi dua puluh tujuh (27), jadi suami mendapat sembilan (9) bagian, ibu enam (6) bagian, kakek delapan (8) bagian, dan saudara kandung perempuan empat (4) bagian.⁵⁰

Dalil yang dijadikan penguat oleh Imam Syafi'i adalah:

1. Surat al-Nisa>' ayat 7 dan surat al-Anfal ayat 75

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

⁵⁰ *Ibid*, h. 7763-7764.

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya..." (Q.S. Al-Nisa>: 7)⁵¹,

".....orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)... " (Q.S. al-Anfal ayat 75)⁵²

2. Kewarisan kakek bersama saudara bertendensi pada keputusan sahabat Zaid bin S|abit ketika Mu'a>wiyah menulis surat kepadanya, maka dibalas oleh beliau: "aku sendiri telah menyaksikan Umar r.a sebelum saudara memberikan kepada kakek seperdua jika dia mewaris bersama-sama seorang saudara laki-laki dan sepertiga jika ia mewaris bersama-sama dua orang atau lebih saudara, dan tidak boleh kurang bagian kakek itu dari sepertiga, sekalipun banyak jumlah saudara-saudara itu, tidak peduli apakah saudara-saudara itu laki-laki, perempuan, begitu juga Umar, r.a membagi antara kakek bersama saudara kandung serta seayah dan tidak pada saudara seibu".

Begitu juga ‘Usman bin Affa>n, r.a membagi kewarisan kakek bersama saudara sebagaimana Umar, r.a.⁵⁴

3. Imam Syafi'i menegaskan dengan mengomentari kewarisan kakek bersama saudara dalam *al-Risalah*, diantaranya adalah: tidak ada nas} eksplisit dalam al-Qur'a>n maupun al-Hadis|; hak waris kakek semata-mata bukan karena keayahan dan hubungan kakek bersama saudara dikiaskan dengan "*kakek adalah bapak dari ayah si mayyit sedang saudara adalah sepupu dari ayah, artinya masing-masing berhubungan dengan si mayyit melaui ayah*"; mengenai ketentuan kakek tidak boleh kurang dari 1/6 hanya mengikuti ketentuan Nabi saw.; bagian kakek bersama saudara mendapat bagian yang sama atau lebih besar; melindungi hak waris saudara laki-laki dengan kakek sebagaimana dikiaskan dan pendapat ini mayoritas ahli fikih dulu dan sekarang; disamping itu pewarisan saudara laki-laki sangat kokoh karena ditegaskan oleh nas} al-Qur'a>n, sedang kakek tidak dan bahkan pewarisan saudara perempuan pun lebih tegas di dalam sunnah dari pada pewarisan kakek.⁵⁵

B. KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA MENURUT HAZAIRIN

1. Biografi Hazairin

⁵⁴ Husain bin ‘Ali> al-Baihaqi, *Ma’rifah al-Sunan wa al-a>s/a>r ‘an Ima>m Muhammad bin Idris al-Syafi’i*, Jilid V, h. 63-64.

⁵⁵ Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 257-261.

agama Islam ia belajar sendiri. Ia menguasai bahasa Belanda, Inggris, dan Perancis secara aktif. Ia juga menguasai bahasa Arab, Jerman, dan Latin secara pasif.⁵⁷

Nama lengkap Hazairin adalah Prof. Dr. Hazairin SH, dengan Gelar Pangeran Alamsyah Harahap.⁵⁸ Gelar kehormatan akademik adalah “Profesor” diberikan oleh Senat Guru Besar Universitas Indonesia atas prestasinya di kedua bidang hukum yakni hukum Islam dan hukum Adat, dengan keahlian Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, penganugerahan Profesor diberikan padanya tahun 1952.⁵⁹ Sedangkan gelar “Gelar Pangeran Alamsyah Harahap” diberikan atas jasanya yang peduli terhadap adat istiadat Tapanuli Selatan, ketika ia ditugaskan pemerintah Hindia Belanda di Pengadilan Negeri Padang sidempuan dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat di sana.⁶⁰

Sebagai seorang yang mendapatkan ilmu di lembaga pendidikan Barat yang sekuler, namun karena beliau dilahirkan dalam lingkungan yang taat beragama, sehingga pemikiran beliau khususnya bidang hukum selalu dikembali pada al-Qur'a>n dan al-Sunnah. Di samping beliau taat beragama kenyataan lain adalah bahwa Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal lain yang

⁵⁷ Al Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 3

⁵⁸ DEPAG RI, *Enslikopedi Islam di Indonesia*, h. 358.

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, h. 55.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 53.

juga mempengaruhi adalah keahliannya dalam lapangan hukum adat di Indonesia dan hukum Islam.⁶¹ Sedangkan dalam lapangan hukum Islam, Hazairin memperjuangkan sejak tahun 1950-an dalam penerapan sistem hukum Islam di Indonesia, baik tatanan hukum perdata maupun pidana dengan membangun suatu bentukan “mazhab nasional”.⁶² Keberanian Hazairin mengkritisi hukum yang berkembang dalam masyarakat nampak jelas dalam tulisannya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Islam, dia tidak segan-segan dengan menyebut teori receptie Snouck Hurgronje sebagai “teori Iblis”,⁶³ karena dianggapnya hukum Islam baru dapat diterima setelah diakui oleh hukum adat, dan teori ini antitesa dari teori Receptio in Complexu oleh Van Den Berg yang ditentangnya dengan teori Receptie Exit, karena bertentangan dengan al-Qur’a>n dan al-Hadis} Nabi sebagai dasar keyakinan agama oleh umat Islam.⁶⁴ Dalam kewarisan Islam lewat tulisannya yaitu 'Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’a>n', 'Hendak Kemana Hukum Islam', telah membawa implikasi terjadinya pemahaman yang baru secara total dan komprehensif dengan landasan al-Qur’a>n dan Hadis|⁶⁵

2. Konsep Hukum Waris Menurut Hazairin

⁶¹ *Ibid*, h. 57.

⁶²*Ibid.*, h. xviii.

⁶³Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, h. xiv.

⁶⁴ *Ibid.*, h. xvi.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 73.

Salah satu teorinya yang terkenal yaitu teori “teori hukum kewarisan bilateral”. Beliau menulis seperti:

“Jika telah kita insafi bahwa Qur’an anti clan (unilateral), tidak menyukai sistim matrilineal dan patrilineal, karena sistim-sistim itu mengadakan syarat exogami bagi perkawinan, maka satu-satunya conclusi yang dapat ditarik ialah bahwa Qur’an via ayat 24 An-Nisa’ itu menghendaki sebagai keridaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang bilateral dimana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat exogami (Exogami ialah larangan untuk mengawini anggota seclan, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang di luar clan) . Dalam hubungan ini maka tidak sesuai lagi bunyinya, manakala Ahlusunnah Wa al-Jamaa’ah membedakan usbah dan yang bukan ‘usbah, umpamanya dalam lapangan kewarisan membedakan antara ‘asabat dengan pecahannya binafsihi, bi’ghairi dan ma’a ghairi di satu pihak dan dzawu’larham di lain pihak, dalam menyalurkan sistim kewarisan menurut Qur’an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada fara’id dalam suatu sistim model bilateral dan bukan model patrilineal. Dzawu’l arham menurut Ahlussunnah Wa al-Jama’ah mungkin mengenai seorang perempuan dalam usbahnya di pewaris, tetapi umumnya mengenai orang-orang dari lain-lain ‘usbah yaitu ‘usbah pihak suami anak perempuannya atau ‘usbah pihak ayah dari ibunya, pihak-pihak mana dapat kita bandingkan dengan pihak anak boru dan pihak mora bagi orang Batak ditinjau dari kedudukan suatu kahanggi. ‘Usbah dan ‘asbat dalam semua perinciannya adalah bentuk-bentuk kekeluargaan patrilineal yang berlawanan dengan bentuk bilateral.”⁶⁸

Ketertarikan Hazairin melakukan untuk Istimbat adalah; pertama, hukum kekeluargaan manakah yang sesuai dengan hukum kewarisan menurut al-Qur’a>n. Kedua, kewarisan yang ada dalam al-Qur’a>n termasuk dalam jenis kewarisan yang mana. Ketiga; apakah dalam hukum kewarisan al-Qur’a>n dikenal garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti.⁶⁹

Hazairin dalam menangkap maksud ayat-ayat al-Qur’a>n jika dipelajari dengan beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem

⁶⁸ *Ibid.*, h. 13-14.

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 79. Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al Qur’an*, h. 4.

ulang agar sesuai dengan corak hukum waris bilateral sebagaimana yang sesungguhnya dipresentasikan al-Qur'a>n.⁷⁴

Tiga landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin yaitu sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'a>n adalah sistem bilateral yang individual, dengan keyakinan, bahkan disebutnya dengan istilah 'ainul al-yaqin (seyakin-yakinnya) bahwa secara keseluruhan al-Qur'a>n menghendaki masyarakat yang bilateral dan keberagaman hukum kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adalah ikhtilaf manusia dalam mengartikan al-Qur'a>n.⁷⁵

Pernyataan beliau antara lain: **Pertama**, apabila surat al-Nisa'> ayat 22, 23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al-Qur'ân cenderung kepada sistem kekeluargaan yang bilateral.⁷⁶

Kedua, surat al-Nisa>’ ayat 11 *fi> aula>dikum* (laki-laki dan perempuan) yang menjelaskan semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ibu dan ayahnya). Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak mewarisi dari ibunya dan tidak dari ayahnya. Demikian pula *wa li*

⁷⁴ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h. 4.

⁷⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Our'a>n dan Hadis*, h. 1.

⁷⁶ *Ibid.*, h. I3.

abawaihi dan *wa waris/ahu abawa>hu* (ayah dan ibu) dalam ayat tersebut menjadikan ibu dan ayah sebagai ahli waris bagi anaknya yang mati punah.⁷⁷

Ketiga, surat al-Nisa>' ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris dari saudaranya yang punah, tidak peduli apakah saudara yang mewaris itu laki-laki atau perempuan.⁷⁸

Hazairin mengkonsepkan kewarisan menjadi tiga bagian:

1) Z|u al-fara'>id{

Dalam pandangan Hazairin *z/u al-Fara>'id{* terdiri dari: a) Anak perempuan yang tidak beserta dengan anak laki-laki atau menjadi *mawa>li* bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu. b) Ayah jika ada anak laki-laki dan atau perempuan, c) Ibu, d) Seorang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan, e) Suami, dan, f) Istri.⁷⁹

Istilah *z/u al-Fara>'id* dipakai oleh Syafi'i maupun Hazairin. *Z/u al-Fara>'id* secara bahasa berasal dari kata *z/u* yang berarti mempunyai dan *al-Fara'id* adalah jamak dari kata *fa-ri-d(a)* yang mempunyai arti bagian. Dengan demikian *z/u al-fara>'id* berarti orang yang mempunyai bagian-bagian

⁷⁷ *Ibid*, h. 14.

⁷⁸ *Ibid.*.

⁷⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 82.

Ketentuan ini terjadi dalam keadaan *kala>lah*. Mereka adalah saudara seibu pewaris untuk *mawa>li* ibu, dan saudara seayah pewaris untuk *mawa>li* ayah.⁸³

Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan individual bilateral. Pertama; anak beserta keturunannya, kedua; ayah beserta keturunannya, ketiga; saudara beserta keturunannya, ke empat; yaitu untuk keadaan dimana si mati tidak berketurunan, tidak berorang tua, dan tidak pula bersaudara atau keturunan saudara. Berdasarkan ayat-ayat kewarisan surat al-Nisa>: 11, 12, 33, 176,⁸⁴ dikelompokkan sebagai berikut:

1. Keutamaan pertama, ada tiga:

- a. Anak-anak laki-laki dan perempuan, atau sebagai *z|awu al-Fara>'id* atau sebagai *z/u al-Qara>ba*, berarti *mawa>li* bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan. Dasarnya adalah al-Qur'a>n surah al-Nisa>' ayat 11, dan 33,
- b. Orang tua (ayah dan ibu) sebagai *z/u al-Fara>'id{*. Dasar hukumnya surah al-Nisa>' ayat 11,
- c. Janda atau duda sebagai *z/u al-Fara>'id{*. Berdasarkan surah al-Nisa>' ayat 12.

2. Keutamaan kedua, ada empat:

⁸³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, h. 37

⁸⁴ *Ibid.*, h. 37, Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 87-88.

- a. Saudara laki-laki atau perempuan, sebagai *z/u al-Fara>'id{* atau sebagai *z/u al-Qarabah*, beserta *mawa>li* bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam hal *kala>lah*. Berdasarkan surat al-Nisa>': 12, al-Nisa>': 176 dan al-Nisa>': 33;
 - b. Ibu sebagai *z/u al-Fara>'id{* . Kedudukan ini berdasarkan dalil naqli surat al-Nisa>': 11 al-Nisa>': 12 dan al-Nisa>': 176;
 - c. Ayah sebagai *z/u al-Qarabah* dalam hal *kala>lah*, sebagaimana dalil al-Qur'a>n surat al-Nisa>': 12
 - d. Janda atau duda sebagai *z/u al-Fara>'id{*. Kedudukan ini dikuatkan dengan nash al-Qur'a>n surat al-Nisa>': 12.
3. Keutamaan ketiga, ada tiga:
- a. Ibu sebagai *z/u al-Fara>'id{*. Berdasarkan dalilnya al-Qur'a>n pada surat al-Nisa>': 11
 - b. Ayah sebagai *z/u al-Fara>'id{*. Kedudukannya dikuatkan oleh dalil al-Qur'a>n surat al-Nisa>': 11
 - c. Janda atau duda sebagai *z/u al-Fara>'id{*. Dalil naqli pada surat al-Nisa>': 12.
4. Keutamaan keempat, ada tiga:
- a. Janda atau duda sebagai *z/u al-Fara>'id{*. Berdasarkan dalil naqli dalam surat al-Nisa>': 12;
 - b. Kakek dan *mawa>li* untuk mendiang Kakek. Pegangan dasar dalam hal ini adalah al-Qur'a>n surat al-Nisa>': 33

atau bapak, ataupun kalau ada keduanya ibu dan bapak (sesudah tidak ada anak dan saudara) maka kelompok keutamaan ketigalah dia. Janda atau duda yang selalu ikut itu, penentu kelompok keutamaan keempat. Pokok masalah keutamaan ketiga yaitu kakek, dan pokok masalah kelompok keempat yakni saudara dengan garis menyamping sampai derajat keenam.

Hal tersebut di atas sebagai cara dalam menentukan kewarisan bilateral untuk menyelesaikan persoalan kalau dalam suatu kasus kewarisan cukup banyak ahli waris yang berhak mewaris yang nyata satu dengan yang lain ada yang lebih dekat kepada si pewaris terbanding dengan ahli waris yang lain walaupun sama-sama *ulu al-Arham* sama-sama punya hubungan darah.⁸⁶

3. Bagian Waris Kakek

Kakek dipahami oleh Hazairin yaitu dengan menghimpun secara bilateral yakni kakek dari ayah dan ibu, demikian juga nenek sama-sama berhak mewaris.⁸⁷ Hazairin tidak mengambil kedua hadis dalam bab dua tentang bagian kakek sebagai tendensi, karena menurut beliau tidak jelas perkaranya dan ketentuan bagian kakek dalam hadis itu adalah kebijakan Rasulullah dalam taraf kebebasan sebelum turunnya surat al-Nisa>': 33 dan 176.⁸⁸ Sementara kakek dari ibu yang dianggap oleh para ulama sunni sebagai *Z/awi al-'Arha>m*

⁸⁶ *Ibid.*,.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 124-126,

⁸⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, h.125-126.

2. Kakek mewarisi hanya apabila apabila pewaris mati punah (*kala>lah* seperti poin 1), maka haknya sebagaimana hak ayah yaitu *zu-al-qara>bah* yang menghabiskan seluruh harta jika sendiri dan jika bersama kakek dari ibu dan kakek dari ayah, maka dia sebagai *mawa>li* (pengganti) bagi ayah dan ibu.⁹²

4. Bagian Waris Saudara

Tentang *akhun* (saudara laki-laki), *ukhtun* (saudara perempuan), *ikhwatun* (saudara-saudara) seperti di temui dalam ayat-ayat *kala>lah* (al-Nisa>' ayat 12 dan 176), Hazairin menyamakannya secara bilateral dan menurutnya tidak boleh berlainan dalam menafsirkan hubungan persaudaran itu walaupun berlainan cara pembagiannya. Jadi saudara diartikan baik karena pertalian darah dengan ayah, maupun dengan ibu,⁹³ dengan sebab hubungan ayah dan ibu dalam surat al-Nisa>' ayat 11 adalah ayah kandung dan ibu kandung. Bagian ayah atau ibu itu dapat berbeda-beda menurut keadaan, demikian pula anak dengan anak.⁹⁴

Hazairin mengartikan *kala>lah* dalam surat al-Nisa>': 12 dan 176 dengan mengaitkan arti *mawa>li* surat al-Nisa>': 33 dan diperluas secara bilateral. Beliau menghubungkan arti '*awla>d* jamak dari *walad* dalam surat al-Nisa>': 11 yang dimungkinkan anak laki-laki dan mungkin anak perempaun,

⁹² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, h. 99 j 107.

⁹³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, h. 50

⁹⁴ *Ibid.*, h. 51

mungkin bergandengan kedua jenis anak itu dan mungkin pula tidak, seperti dalam kalimat "*fa'in kunna nisa>'an*", sehingga arti *kala>lah* adalah keadaan seseorang yang mati dengan tidak ada baginya seorang anakpun (keturunan), baik laki-laki maupun perempuan. Keturunan diartikan setiap orang digaris ke bawah, tidak peduli apakah garis itu melalui laki-laki atau perempuan.⁹⁵

8. Ayah mempengaruhi perolehan saudara perempuan *s}ah{i>h{ah* yang terdiri dari dua orang atau lebih dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{2}{3}$ berbagi rata,
9. Ia dapat menghibah kakek dan nenek dari berbagai jurusan, sedang ia sendiri terhibah oleh *far'un waris/ muz/akkar* atau *mu'annas*.¹⁰¹

Bagian saudara perempuan seayah, Hazairin membagi:

1. Mendapat sebagaimana halnya saudara perempuan *s}ahi>hah*,
2. Mendapat *z/u al-fara>'id{*, dan *sebagai z/u al-qarabah*,
3. Dia berada dalam satu derajat dengan saudaranya yang perempuan ataupun laki-laki tanpa membedakan jurusan dengan perbandingan 2:1,
4. Ia dapat menghibah kakek dan nenek dalam berbagai jurusan dan ia terhibah oleh *far'u waris/* baik laki-laki dan perempuan.¹⁰²

Hazairin membagi bagian saudara perempuan seibu sebagai berikut:

1. Mendapat sebagaimana halnya saudara perempuan *s}ah{i>h{ah* atau perempuan seayah,
2. Memperoleh sebagai *z/u al-fara>'id{* dan *sebagai z/u al-qarabah*,
3. Ia sederajat tanpa membedakan dari jurusan kandung (*s}ahi>h*), seayah, dan seibu, hanya antara laki-laki dan perempuan berbanding 2:1,
4. Ia mendapat $\frac{1}{2}$ apabila sendirian dan $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ bila bersama ayah atau ibu, atau suami/istri.
5. Ayah mempengaruhi perolehan mereka dari $\frac{2}{3}$ menjadi $\frac{1}{3}$ jika berbilang.

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 114-115.

¹⁰² *Ibid.*, h. 118.

tua dari orang tua (kakek atau nenek) dan mereka ini sebagai mawali telah mendapat tempat dalam keutamaan keempat.¹⁰⁹

Sedangkan duda atau janda (suami-istri), absolut tidak mungkin diadakan *mawa'li* oleh karena mereka baru ada dengan matinya si pewaris, dan tidak mungkin ada sebelum matinya si pewaris.¹¹⁰

Tendensi beliau sebagai dalil pendukung kewarisan kakek bersama saudara adalah:

1. Surat al-Nisa>': 33 dengan penafsirannya sendiri:

"Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawad'li bagi harta peninggalan ayah dan ibu dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya".¹¹¹

Dalil ini berawal dari kesimpulan beliau tentang garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian , yaitu:

a) Tentang hubungan orang tua (ayah dan ibu) dan anak merupakan hubungan kedarahan yang paling akrab yaitu pada surat al-Nisa>': 11

"a>ba>'ukum wa a>bna>ukum la> tadru>na ayyuhum aqrabu lakum naf'an", selanjutnya hubungan kedarahan yang dijeniskan al-Qur>'an dalam dua istilah: yaitu pertama: *'aqrabun* dalam surat al-'Imra>n: 180, al-Nisa>': 7 dan 33, dimana istilah itu ditempatkan setelah kata *wa>lida>n*; kedua: istilah *'u>lu> al-Qurba>* dalam surat al-Nisa>': 8. Istilah itu menunjukkan kekeluargaan hubungan darah antara seseorang dengan

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 38.

¹¹⁰ *Ibid.*,.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 27.

BAB IV

ANALISIS KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN HAZAIRIN

A. Analisis Komparasi Kewarisan Kakek Bersama Saudara menurut Imam Syafi'i dan Hazairin Terhadap. dalam Persamaan dan Perbedaannya.

a. Faktor Perbedaan antara Pendapat Imam Syafi'i dan Hazairin

Sebagaimana ulama' tafsir, al-Qurtubi menjelaskan lafaz *al-ab* berbentuk *tas/niyyah* sehingga tidak bisa diperluas kepada leluhur di atas orang tua seperti perluasan orang lafaz *al-aula* kepada keturunan di bawah anak, sebab ketika ada nenek dan kakek menuntut hak waris, di masa sahabat mereka tidak merujuk ayat ini tetapi mencari hadis-hadis.¹ Imam Syafi'i mengomentari dalam al-Risalah, ketentuan kakek tidak boleh kurang dari 1/6 imam Syafi'i hanya mengikuti ketentuan hadis Nabi saw. dan beliau mengakui kewarisan saudara lebih tegas di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dari pada kewarisan kakek yaitu surat al-Nisa' 12 dan 176.

Sedangkan Hazairin, terhadap bagian kakek tidak bertendensi pada hadis yang menurutnya tidak ada hadis yang jelas menerangkannya, namun bagiaannya mendasarkan pada surat al-Nisa' ayat 33, yaitu kakek hanya

¹Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz V, h. 60.

tersirat mempunyai tempat dalam ayat tersebut, yaitu *mawa>li* (pengganti) bagi ayah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Dimyati al-Bakri seorang ulama' Syafi'iyah juga mengqiyaskan kakek (ayah dari ayah) kepada ayah, yaitu sebagai *z/u al-fara'id* yaitu 1/6 sebagaimana surat al-Nisa' ayat 11 "*li abawaihi likulli wa>hidin minhuma> al-sudus*", dimana kakek diibaratkan seperti ayah, yaitu ayah yang dianggapnya mendapat waris atau dianggap *s/ahi>h* yaitu hanya kakek dari ayah saja yang tidak diselingi oleh perempuan sebagaimana matan hadis dalam bab dua.² Sedangkan kakek dari ibu sebagai *z/u al-arha>m* sebab termasuk kakek *gairu s{ahi>h* yang tergolong dari kelompok *z/u al-arha>m*, yaitu kerabat jauh selain *z/u al-fara>'id* dan *'as{abah* yang tidak berhak mewaris, yang menurut 'Ali al-Baihaqi surat al-Ah{zab ayat 6 dan al-Anfa>l ayat 75 dikutip oleh imam Syafi'i sebagai dalil untuk *z/awi> al-Arha>m*.³ Sama halnya apa yang diterangkan al-Qurtubi dalam bab dua bahwa Abu> Bakar, Zaid, Ibn'Umar dan satu riwayat dari 'Ali>, berpendapat bahwa *z/u al-arha>m* adalah anggota kerabat yang tidak ditentukan bagian warisnya dalam al-Qur'a>n dan al-Sunnah, tidak berhak mewarisi.

² Muhammad Syat}t}a> al-Dimyat}i al-Bakri>, *Ha>syiyah I'a>nah al-T{a>libi>n* Juz III, h. 393.

³ Husain bin 'al> al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-'A>s/a>r 'an Ima>m Muhammad bin Idris al-Syafi'i*, Jilid V, h. 78-79. Al-Syafi'i, *Ah{ka>m al-Qur'a>n*, 108. Depag, SajutiThalib, *Hukum Waris Islam*, h. 29.

Hazairin menanggapi lafaz| "*al-arha>m*" ayat tersebut mencangkup *wa>lida>n*, *aula>d*, *aqrabu>n* dan '*u>lu> al-Qurba>*, yaitu hanya menyinggung garis keutamaan, karena berbicara tentang kelebihan sebagian anggota kerabat atas sebagian yang lain.⁴ Dengan demikian beliau tidak sependapat dengan Abu> Bakar, Zaid, Ibn 'Umar sebagaimana keterangan al-Qurt}ubi.

Sedangkan kakek dalam perspektif Hazairin, yaitu dengan menghimpun secara bilateral, sehingga kakek dari ayah dan kakek dari ibu sama-sama sebagai ahli yang berada pada kelompok ahli waris ke empat (konsep pengelompokan dalam istimbatnya) sebagai *mawa>li* (pengganti) dari ayah dan *mawa>li* bagi ibu dan bagiannnya mendasarkan pada surat al-Nisa>' ayat 33, yaitu kakek hanya tersirat mempunyai tempat dalam ayat tersebut, yaitu *mawa>li* dipahami sebagai ahli waris pengganti yaitu kakek adalah sebagai pengganti bagi ayah dan ibu.

Mengenai surat al-Nisa>' ayat 33, menurut al-Qurtubi, bahwa *mawa>li* berasal dari kata *maula* itu merupakan kata *musytarak* (mempunyai banyak arti) yang tergantung pada konteksnya, *mawa>li>* bisa dinamakan *mu'tiq* (yang memerdekakan atau tuan) *mu'tiq* (yang dimerdekakan), *al-Asfal* (yang rendah), *al-A'la* (yang terbatas), *al-Nasir* (yang menolong), juga *Ibn al-'Am* (anak paman), tetapi yang dimaksud adalah ahli waris *'aslabah*.⁵ Sependapat

⁴ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, h. 39. j 70.

⁵ Abu Abdullah Ibn Ahmad al-Qurtubi, *al-Jami' li 'Ahkam al-Qur'an*, Juz V, h. 146.

dengan imam Syafi'i memaknai ayat ini sebagai ahli waris *'as}abah* sebagaimana menurut Musa> bin 'Imra>n al-'Imra>ni, *'as}abah* dalam maz|hab Syafi'i berdasarkan surat al-Nisa>' ayat 33, yaitu "*wa likulli ja'alna>mawa>liya mimma> taraka al-wa>lida>ni wa al-'aqrabu>na*", yang mana *al-'aqrabu>na* diartikan ahli *'as}abah*.⁶

Kewarisan saudara tertera dalam surat al-Nisa>' ayat 12 dan 176, yaitu mewaris ketika *kala>lah*, yang dalam kaidah usul fikih, lafaz| *kala>lah* dalam surat al-Nisa>': 12 dan 176 tersebut termasuk istilah Syara' dalam kategori *mujmal*⁷ yaitu lafaz| yang mengandung banyak keadaan atau hukum dan tidak dapat diketahui tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, sehingga banyak arti dalam menafsirkan lafaz| tersebut.⁸ Ketidaksediaan Rasul menjawab pertanyaan Umar tentang arti *kala>lah* secara tegas, lebih menguatkan adanya keizinan untuk mengijtihadkan sesuai dengan kondisi waktu itu dan ijtiha para sahabat berada dalam batas yang diizinkan sebagaimana keterangan al-Jas}s}as dalam bab dua, menjelaskan pada mulanya umar berpendapat bahwa *kala>lah* adalah orang yang mati punah kebawah (jadi mungkin masih mempunyai orang tua). Tetapi pendapat ini beliau tinggalkan karena dikritik

⁶ Musa> bin 'Imra>n al-'Imra>ni>, *al-Baya>n fi> Fiqh al-Ima>m al-Syafi'i>*, Juz IX, h. 63.

⁷ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, h. 97.

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, h. 61.

oleh sahabat lainnya, khususnya Abu> Bakar, yang mengartikannya sebagai orang yang tidak meninggalkan keturunan dan orang tua.⁹

Al-T{abari memaparkan beberapa riwayat yang menjadi sebab langsung turunnya ayat 12, yaitu pengaduan istri Sa'ad kepada Nabi saw, karena saudara Sa'ad mengambil seluruh harta peninggalan dan tidak menyisakan barang sedikit pun untuk anak-anak perempuan Sa'ad. Peristiwa ini terjadi setelah perang Uhud). Riwayat lain menyatakan bahwa ayat 12 ini turun berkenaan dengan pembatalan sistem kewarisan Arab jahiliyah yang memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki dewasa yang telah sanggup untuk berperang.¹⁰ Al-T{abari juga mengutip pendapat khalifah Abu Bakar r.a bahwa surat al-Nisa' ayat 12 turun untuk mengatur hak kewarisan suami-istri dan saudara seibu, sedang ayat 176 mengatur sisi kewarisan dari saudara kandung dan seayah.¹¹ Sebagaimana Kiya> al-Harra>si di dalam hadis mereka temukan bahwa saudara berhak mewarisi ketika bersama-sama dengan anak perempuan atau ibu, hadis itu memberi petunjuk bahwa kehadiran anak perempuan atau ibu tidaklah mempengaruhi keadaan *kala>lah* seseorang.¹² Demikian pula dalam perspektif imam Syafi'i, *kala>lah* diartikan sebagaimana jumhur sahabat sebagaimana keterangan para mufassir dengan mengartikan dengan mentakhsis arti *wad* (etimologis) dan *isti'mal* (bersasarkan pemakaian

⁹ Al-Jas} s} a} s}, *Ahka>m al-Qur'a>n*, jilid II, h. 82.

¹⁰ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-T[obari, *Ja'mi' al-Baya>n 'an Ta'wi'l a>i al-Qur'a>n*, an-Nisa ayat 12 Juz III, h. 376. dan al-Nisa ayat 176 Juz V, h. 55.

¹¹ *Ibid.*

¹²Al-Kiya al-Harra>si>, *Ahka>m al-Qur'a>n*, Jilid I h. 361

masyarakat zaman Nabi saw.), yaitu orang yang mati tidak meninggalkan anak (keturunan) laki-laki dan ayah.*isti'ma>l*, yaitu orang meninggal yang tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan ayah, sehingga berpengaruh terhadap kewarisan kakek bersama saudara.

Sementara Hazairin mengenai kewarisan para saudara, beliau menyamakan kedudukannya dalam menerima waris, baik sekandung, seayah, dan seibu dengan berbanding 2:1 antara laki-laki dan perempuan, yang dalam konsepnya saudara berada pada kelompok keutamaan kedua, yaitu sebagai *z/u al-Fara'id* atau sebagai *z/u al-Qarabah* (orang yang menerima sisa harta dalam keadaan tertentu).

Hazairin, mengenai *kala>lah* dalam surat al-Nisa>' ayat 176 tersebut susunannya sudah cukup jelas sehingga tidak layak diartikan lain, sedangkan arti yang dipilih Hazairin ini adalah pendapat 'Umar bin Khat}t}ab yang kemudian dia tinggalkan karena dikritik oleh sahabat yang lain, yaitu diartikan dengan orang yang meninggal tidak meninggalkan keturunan laki-laki dan perempuan yang kemungkinan terdapat orang tua,¹³ yaitu berdasarkan surat al-Nisa>': 12 dan 176, dan membedakan *kala>lah* surat al-Nisa>': 12 dan 176 tidak pada perkataan '*akhun*' atau '*ukhtun*', tapi pada sebab keadaan yang berlainan bagi orang tua si pewaris. Pada surat al-Nisa>': 176, mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan tetapi ada meninggalkan saudara, yakni dalam hal ayahnya telah mati terlebih dahulu, (jadi mungkin

¹³ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, h. 49.

ayah dan ibu sudah mati terlebih dahulu, atau mungkin ayah sudah mati tetapi ibu masih hidup) dan pada surat al-Nisa>': 12, mengatur kewarisan seseorang yang mati tidak berketurunan, tetapi ada kemungkinan saudara beserta ayah (jadi kemungkinan ibu juga masih hidup, atau mungkin ibu sudah mati). Dasar ini beliau tafsirkan dari sisi kebahasaan dan tidak menerima adanya takhs}ih hadis juga *isti'ma>l* sebagaimana jumhur sahabat.

b. Persamaan Pendapat antara Imam Sya'fi'i dan Hazairin

Dari sisi persamaan hanya antara Ima>m Sya>fi'i dan Hazairin hanya dalam kewarisan saudara saja, dengan mendasarkan surat al-Nisa>' ayat 12 dan 176, namun penafsirannya berbeda sebagaimana keterangan di atas demikian pula tendensi adanya kewarisan kakek.

c. Perbedaan Pendapat antara Imam Sya'fi'i dan Hazairin

Kakek *s}ahi>h* dalam konsep kewarisan imam Syafi'i adalah termasuk *z/u al-fara>'id*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian waris dalam keadaan yang telah ditentukan secara pasti. Kakek juga termasuk bagian dari *'as}abah bi al-nafsi* yaitu semua orang laki-laki yang pertalian nasabnya kepada pewaris tidak terselingi oleh perempuan yang bagian mereka ditentukan oleh kedekatannya kepada pewaris, tanpa memerlukan orang lain agar dapat mewarisi secara *'us}bah* (menghabiskan sisa bagian).

Sementara saudara laki-laki pewaris baik seayah dan sekandung termasuk keturunan mereka adalah sebagai *as}abah bi al-nafsi*. Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk sebab mereka termasuk *as}hab al-*

furud}. Sedangkan saudara perempuan *sah{i>h{ah* (kandung) dan saudara perempuan seayah selain tergolong dalam *z/u al-fara'>id* juga termasuk *'as}abah bi al-ghairi*, yaitu ahli waris *z/u al-fara>'id* perempuan yang tergandeng dengan laki-laki yang menjadi *mu'as}s}ib*-nya, sementara saudara perempuan seibu hanya termasuk *z/u al-fara>'id*).

Sebagaimana Muhammad Baltaji menjelaskan pendapat Umar yang sering mempunyai intuisi tajam terhadap maksud dan tujuan *nas*}, sangat menaruh perhatian terhadap masalah *kala>lah* yang juga erat kaitannya dengan masalah *jad ma'a al-ikhwah* (kakek bersama saudara), karena *kala>lah* adalah bagaimana *al-ikhwah* mendapatkan warisan dan *jad* ketika mewaris bersama-sama *ikhwah* sama halnya dengan mewarisnya *ikhwah*.¹⁴

Kewarisan kakek jika bersamaan dengan para saudara (saudara sekandung, seayah, baik laki-laki maupun perempuan), imam Syafi'i lebih sependapat dengan jumhur sahabat dan t}abi'in, yakni Zaid bin S|abit, Umar bin Khat}t}ab, Usman, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Auza'i, al-S|auri¹⁵ yang menyatakan para saudara laki-laki atau perempuan kandung dan seayah berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dengan kakek. Kakek tidaklah menggugurkan hak waris para saudara kandung dan yang seayah. Kakek jika bersamaan dengan para saudara dapat mewaris jika tidak ada ahli waris yang

¹⁴Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar bin al-Khat**a>b fi> Tasyri>' Dira>sah Mustau'ibah Lifiqhi Umar wa Tanz**i>ma>tuhu*, alih bahasa Masturi Irham, h. 345.

¹⁵ Ibnu Rusydi al-Qurthuby, *Bayanatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtas* [yid Juz V, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 413.

menghijabnya (ayah dan keturunan pewaris) atau disebut juga dalam keadaan *kala>lah* (dalam perspektif imam Syafi'i, tidak ada ayah dan keturunan laki-laki). Sementara saudara laki-laki dan perempuan seibu terhibab dengan adanya kakek yang mewaris bersama saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung dan seayah.

Sedangkan cara penyelesaian kewarisan kakek bersama saudara lebih sepakat dengan pendapat Umar bin Khat{t}ab dan Zaid bin S{abit} yaitu: kakek berbagi rata (*muqasamah*) dengan saudara laki-laki sampai batas $\frac{1}{3}$ apabila tidak ada ahli waris lain. Kakek dan saudara sama-sama menjadi '*asabah*', karena dia menarik saudara perempuan menjadi menjadi '*asabah bi al-gair*'. Namun jika kakek bersama saudara masih ada ahli waris lain (semisal ibu atau suami), maka sisa warisan setelah dikeluarkan harta *z/awi al-furu>d}* itu dibagi rata antara kakek bersama saudara selama bagian kakek tidak kurang dari $\frac{1}{3}$ sisa atau $\frac{1}{6}$ warisan, dan kakek berhak mendapat yang paling menguntungkan dari tiga kemungkinan tersebut.¹⁶

Ketentuan *muqasamah* adalah karena kakek dan saudara dianggap setingkat, sama-sama berjarak dua derajat dari pewaris dan sama-sama berhubungan melalui ayah. Ketentuan tidak boleh kurang dari 1/6 warisan di-*qiyas*-kan kepada keadaan ketika mewarisi bersama-sama dengan anak. Ketentuan tidak boleh kurang dari 1/3 sisa di-*qiyas*-kan pada keadaan dua kali bagian ibu. Sekiranya ahli waris hanya ibu dan kakek, maka kakek akan

¹⁶ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, h. 164-165.

mendapat dua kali bagian ibu; bagian ibu yang paling sedikit adalah $\frac{1}{6}$; maka kakek harus mendapat sepertiga.¹⁷

Selanjutnya penghibahan saudara kandung terhadap saudara seayah tidak diperhitungkan ketika menentukan besar bagian kakek. Maksudnya, saudara kandung dan saudara seayah dianggap setingkat ketika menentukan bagian perolehan dan karenanya dia pun mendapat bagian. Tetapi di dalam pembagian, bagian atau saham yang menjadi milik saudara seayah itu diserahkan kepada saudara kandung dan dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kehadiran saudara seayah hanya diperhitungkan untuk memperkecil bagian kakek dan untuk keuntungan saudara kandung. Mungkin keadaan ini dapat menjadi petunjuk tambahan tentang masih adanya keraguan dalam melebihkan kakek atas saudara.¹⁸

Ketika kakek bersama saudara mewaris, imam Syafi'i mengkiaskan dengan "*kakek adalah bapak dari ayah si mayyit sedang saudara adalah sepupu dari ayah, artinya masing-masing berhubungan dengan si mayyit melalui ayah*".¹⁹ Keumuman "*al-'Aqrabu>n*" dalam surat al-Nisa>' ayat 7 masuk dalam pengertian kakek dan para saudara, sehingga kakek dapat mewaris bersama saudara.²⁰

¹⁷ *Ibid.*, h. 165.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 258.

²⁰ Musa> bin 'Imra>n, *al-Baya>n fi> Fiqh al-Ima>m al-Syafi'i>*, Juz IX., h. 81-82.

terdapat keturunan yang lebih jauh dari anak (*mawa>li* bagi mendiang anak yang bersangkutan, yaitu yang jadi penghubung bagi mereka), keturunan saudara (*mawa>li* bagi mendiang saudara yang bersangkutan, yaitu yang menjadi penghubung bagi mereka).

Jika dibandingkan pendapat Hazairin pada pendapat Imam Syafi'i tetap terlihat sejalan, yang pada prinsipnya: anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris, kedua orang tua dan semua saudara (laki-laki dan perempuan, yang seayah atau seibu) pun adalah ahli waris.²³ Hanya untuk derajat yang lebih jauh ada perbedaan antara Hazairin dan imam Syafi'i. Menurut imam Syafi'i, cucu hanyalah yang melalui anak laki-laki, kakek yang melalui ayah, dan nenek yang melalui ayah dan ibu, sedangkan Hazairin tidak membedakan mereka dari keturunan perempuan ataukah laki-laki.²⁴ Aturan-aturan ini masih bisa dikatakan berada dalam kerangka bilateral dengan semacam prinsip selektif, yang istilah bilateral tidak akan terlalu jauh, karena Hazairin sendiripun menamakan kesimpulan yang beliau capai sebagai bilateral semacam prinsip selektif, yaitu *Sui Generis* (bilateral khas al-Qur'an, bukannya sistem bilateral seperti yang ditemukan di berbagai masyarakat).²⁵ Sekiranya istilah bilateral dan patrilineal ingin tetap dipertahankan, maka akan tepat

Kata-kata "*dapat digantikan*" dalam KHI pasal 185 ayat 1 adalah bermaksudkan " *mungkin dapat digantikan*" atau " *mungkin tidak dapat digantikan*", jadi diberi keleluasaan alternatif atau tidak imperatif (tidak bersifat memaksa), hal mana diserahkan kepada pertimbangan hakim Peradilan Agama menurut hukum kasus demi kasus, bukan menurut hukum dalam fungsi mengatur yang berlaku umum. Sebagaimana pula tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris garis kebawah (anak) dalam KHI , dikarenakan pada kenyataan di beberapa kasus, kasihan terhadap cucu pewaris yang orang tuanya (ayah dari cucu atau anak pewaris) meninggal pula dalam waktu yang singkat setelah kakek atau nenek dari cucu meninggal, dan tidak lepas dari penjelasan pada ayat 2 yang mempunyai arti tersirat, yakni penggantian ahli waris sebenarnya bukan ahli waris tetapi mendapat waris karena keadaan atau pertimbangan tertentu.³⁰

Sehingga dapat disimpulkan para alim ulama' Indonesia menerima konsep tersebut (penggantian ahli waris pasal 185), tapi bukan berdasar pada penggantian ahli waris oleh penafsiran Hazairin pada surat al-Nisa' ayat 33, tetapi didasarkan pada *maqasid as-syariah* yaitu *maslahah mursalah*, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak.³¹

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 82-83.

³¹ *Ibid.*, h. 94.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah ini, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan:

1) Menurut perspektif Imam Syafi'i, kakek yang *s/ahi>h* atau bapaknya bapak jika bersama saudara kandung dan seayah, dapat mewaris dalam keadaan *kala>lah* (tidak berketurunan laki-laki dan berayah), sedangkan saudara seibu terhibab sebab adanya kakek, dan kakek dari ibu tidak mendapat waris karena bukan bagian dari ahli waris atau termasuk dari *z/u al-arha>m*. Dalam penerapannya, jika kakek mewarisi hanya bersamaan dengan para saudara dan tidak ada ahli waris lain dari *as/ha>b al-furud*}, seperti istri atau ibu, atau anak perempuan, dan sebagainya, maka kakek dipilhkan bagian yang lebih banyak dari harta warisan dari dua pilihan yang ada, yaitu: Pertama; dengan cara pembagian (*muqa>samah*), Kedua; dengan cara mendapatkan sepertiga (1/3) harta warisan. Jika kakek mewarisi bersama para saudara dan *as/ha>b al-furud*{ yang lain, seperti suami-istri, ibu, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki atau selain dari para saudara, kakek dapat memilih salah satu dari tiga pilihan yang paling menguntungkannya, yaitu

mewaris jika ada anak laki-laki maupun perempuan beserta keturunan dari keduanya, para saudara (kandung, seayah, dan seibu) beserta keturunannya, ayah serta ibu, dan jika tidak ada maka kakek dapat mewaris sebagai *mawāli* (pengganti) ayah, sehingga saudara dapat mewaris walaupun bersamaan dengan ayah ataupun ibu. Sedangkan dalam perspektif Imam Syafi'i saudara juga dapat mewaris jika ibu dan tidak dapat mewaris jika ada ayah.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, utamanya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mencantumkan kewarisan kakek bersama saudara, namun penyelesaiannya mempunyai tempat dalam KHI pada pasal 229, yaitu Hakim pengadilan Agama dapat menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, jadi dapat diterapkan sesuai dengan pendapat imam Syafi'i. Walaupun demikian, KHI sendiri tidak mengenal adanya penggantian ahli waris, dan penggantian ahli waris dalam pasal 185 bukan berdasar pada penggantian ahli waris oleh penafsiran Hazairin pada surat al-Nisa>' ayat 33, tetapi didasarkan pada *mas}lah}ah} mursalah*, bahwasanya pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak.

B. Saran-saran

- 1) Sudah seharusnya kewarisan kakek bersama saudara di kaji ulang untuk diterapkan bagaimana penyelesaiannya dengan tidak memihak dari pendapat

siapapun ulama' itu, tetapi mencari pendapat siapa yang lebih *mas}lah}ah* terhadap kesejahteraan para ahli waris, yaitu kakek ataukah saudara.

- 2) Hendaknya Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman oleh umat Islam di Indonesia dikembangkan dan disempurnakan dengan mencantumkan penyelesaian kewarisan kakek bersama saudara supaya benar-benar lebih rasional praktis dan aktual mensejajari gerak dinamika laju perkembangan masyarakat Islam pada khususnya, guna dalam pelaksanaannya lebih memenuhi rasa keadilan dan maslahah.

Atas selesainya skripsi ini, akhirnya penyusun mengucapkan syukur *alhamdulillah*, saran dan kritik dari pembaca sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulllah Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta, Widjaya, 1984.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo, Dar Al- Kitab, t.t.
- Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, jilid III, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Khatib, Hasan Ahmad, *al-Fiqh al-Muqaranah*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, jilid II, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, t.t),
- Al-Kiya al-Harasi, *Ahkam al-Qur'an*, jilid I, Beirut, Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983,
- Al-Kausari, Muhammd Zahid bin al-Hasan, *Ahkam al-Qur'an li Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i*, Juz 1, Beirut, Dar al-Fikr, 1985.
- Al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib* , jilid 6, Heiqarabad, Fa'irat al-Ma'arif al-Nizamiyah, t.t).
- Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Fara'id, Permasalahan Dalam Pelaksanaan Fara'id*, Padang, IAIN "IB" Pres, 1999.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, 1990.
- Al-Sarkhsi, *Usul al-Sarkhsi*, Kairo, Dar al-Kitab al-Arabi , t.t,
- Al-Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*, jilid IV, Beirut, Maussasat al-'Alami, t.t),

- Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta, INIS, 1998.
- Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Qurt}ubi, Abu 'Abdilla>h Muhammad bin Ahmad al-Ans}ari, *al-Ja>mi'u al-Ahka>m al-Qur'a>n*, Juz V dan VIII, Beirut, Da>r al-Fikr, 1990.
- Al-Sajastani, Abi> Da>ud Sulaiman bin al-'Asy'as\ >, *Sunan Abi> Da>ud*, Juz II, Beirut, Da>r al-Kutub, 1996.
- Al-San'a>ni, *Subu>l al-Sala>m*, alih bahasa Abu Bakar Juz III, Surabaya, al-Ikhlas, 1995.
- Al-Naisa>buri, Al-Ima>m Abi Husain Musli>m bin al-Hajja>j ibnu Muslim al-Qusyairi, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi> al-Damyiqi>*, Jilid II dan XI, Beirut, Da>r al-Kutub, 1995.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Abi> 'Isa> Muhammad bin 'Isa> bin Saurah, *al-Ja>mi'u al-S{ah}i>h Sunan al-Turmuz/i>*, Juz IV, Beirut, Da>r al-Fikr, 1995.
- Al-Qurthuby, Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtas{yid* Juz V, Beirut, Da>r al-Kutub, 1996.
- Al-'Imra>ni>, Musa> bin 'Imra>n, *al-Baya>n fi> Fiqh al-Ima>m al-Syafi'i>*, Juz IX Beirut, Da>r al-Kutub, 2002.
- Al-Bakri, Muhammad Syat}t}a al-Dimya>t}i, *H}asyiyah I'a>nat al-T{a>libi>n*, Juz III, Beirut, Da>r al-Kutub, 1995.
- Al-Nawawi>, Abi> Zakariya Muh{yi al-Di>n bin Syarif Al-Majmu>', Juz XVI, Beirut, Da>r al-Fikr, tt.
- Ahmad bin 'Ali> bin H}ajar Al-Asqalani, *Fath{ Al-Ba>ri bi Syarh{ imam Bukhari*, Juz XII, Beirut, Da>r al-Fikr, 1996.
- Al-T{o}bari, Abi> Ja'far Muhammad bin Jarir, *Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l a>i al-Qur'a>n*, Juz III, dan Juz V, Beirut, Da>r al-Fikr, 1995.
- Al-Syafi'i, Muhammad Idris, *al-Umm*, Juz III, Beirut, Da>r al-Fikr, 1983.

- Al-Syafi'i, Muhammad Idri>s, *Al-Risa>lah*, 1969.
- Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindah dan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asy-Syarbini, Muhammad al-Khat}i>b, *Mughn>i Al-Muhta>j*, Juz IV, Beirut, Da>r al-Kutub, 1994.
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradian Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dahlan Y Al-Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Surabaya, Target Press, 2003.
- Depag, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, 1993.
- Depag, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Depag, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Departemen Agama RI (DEPAG) , *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, Surabaya, Karya Utama, 2005.
- Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1975.
- Hamid, Muhyiddin Abdul, *Ahkam al-Mawaris Fi Al-Syari'ati al- Islamiyah 'ala Maz|hab al-A'immah al-Arba'ah*, Beirut, Da>r al-Kutub, 1984.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta, Tinta Mas, 1981.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta, Tinta Mas, 1976.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, jilid I, Beirut, Dar al-Fikr, 1992.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alami*, Kairo, Maktabah Abd asl-Salam, 1968.
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

- Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (Patrilineal) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama)*, Jakarta, IND-HILL, 1984.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung, Rosda Karya, 2001.
- Muhammad Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar grafika, 2009.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Baltaji, *Minhaj Umar bin al-Khatib fi Tasyri' Dirasah Mustau'ibah Lifiqhi Umar wa tanzjim>tuhu, alih bahasa Masturi Irham*, Jakarta, Khalifa, 2005.
- Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *Ma'rifah al-Sunan wa al-asar 'an Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i*, Juz V Beirut, Dar al-Kutub, 1991.
- Muhammad Ali Al-Sabuni, *Al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah 'ala D}au' al-Kitab wa al-Sunnah, alih bahasa M. Basalamah*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995.
- Mahmud Syaltut, Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005.
- Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999.
- Saurah, Abi Isa Muhammad Bin 'Isa, *Sunan al-Tirmizi wa Ma'rifatu al-S{ah}i>h*, Juz IV, Beirut, Dar al-Fikr, 1994.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIV, Bandung, al-Ma'arif, 1987.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz X, Beirut, Dar al-Fikr, 1997.